



Laporan Sintesis Hasil Review 340 Perda *

(Tim Peneliti KPPOD) **

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Setahun pelaksanaan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 telah memunculkan aneka persoalan yang sudah dikemukakan oleh berbagai pengamat dan praktisi. Berbagai penelitian juga sudah dilakukan dengan cakupan dan fokus yang beraneka ragam.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sendiri juga sudah mengungkapkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan analisis yang dilakukannya terhadap berbagai Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Untuk keperluan praktis karena cepat bergulirnya waktu, artikulasi persoalan-persoalan tersebut dilakukan tanpa perlu menunggu dipahami pola-pola yang lebih spesifik yang berkaitan dengan kebermasalahan Perda-Perda. Bersama berbagai lembaga yang selama ini juga melakukan kegiatan monitoring, hal ini dilakukan untuk mencegah meluasnya persoalan yang pada tingkat tertentu sebetulnya sudah jelas dan sudah harus dicegah.

Setelah berbagai persoalan dibiarkan mengungkap ke atas permukaan, tampaknya perlu ada upaya untuk memahami persoalan-persoalan tersebut secara lebih sistematis dan menemukan pola serta kecenderungannya. Hal ini diperlukan untuk mengarahkan fokus dari langkah-langkah yang harus diambil dalam mencegah, mengatasi, dan mengendalikan munculnya persoalan-persoalan serupa di masa datang. Pelaporan hasil analisis ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memahami kompleksitas persoalan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, lebih khusus lagi soal peraturan daerah, dengan cara yang diharapkan cukup sistematis, yang dapat men-

gungkap pola serta kecenderungan-kecenderungan utamanya.

I.2. Tujuan Umum

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kecenderungan-kecenderungan utama kebermasalahan berbagai peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah-pemerintah daerah di Indonesia.

I.3. Tujuan - Tujuan Spesifik

Secara spesifik, analisis dilakukan untuk melihat:

1. Sejauh mana persoalan-persoalan yang terkait dengan peraturan daerah dapat dibedakan antara persoalan prinsip, persoalan substansi, dan persoalan teknis, sehingga dapat digambarkan tingkat keseriusan dari persoalan-persoalan yang ditampilkan oleh Perda-Perda yang ada.
2. Sejauh mana persoalan-persoalan yang selama ini dianggap sebagai persoalan prinsip seperti pelanggaran prinsip *free internal trade*, *double taxation*, dan validitas Perda sebagai mekanisme dapat mencapai tujuan pembangunan dapat digambarkan persebaran dan keseriusannya.
3. Sejauh mana persoalan-persoalan substansi dapat dikenali dengan lebih jauh serta digambarkan persebaran dan keseriusannya.
4. Apakah ada pola-pola kebermasalahan yang berbeda antar berbagai jenis peraturan daerah.
5. Apakah bobot dari persoalan-persoalan yang ada dapat ditimbang dalam kaitannya dengan kadar penuntunan dari Pemerintah Pusat?

^{*)} Laporan program Review Perda, disampaikan pada seminar "Otonomi Daerah dan Iklim Usaha", diselenggarakan atas kerjasama KPPOD dengan PEG-USAID, tanggal 19 Maret 2002 di Jakarta.

^{**)} Tim Peneliti KPPOD: Antonius Doni Dihen, Agus Widodo, Agung Pambudhi, Endi Jaweng, dan Ig. Sigit Murwito.

1.4. Signifikansi

Analisis ini diharapkan berguna untuk:

1. Pemerintah Pusat, sebagai masukan bagi perumusan dan pengendalian kebijakan secara lebih terfokus;
2. Pemerintah daerah, sebagai masukan, baik dalam meninjau kembali Perda-Perda yang telah dibuat maupun dalam menuntun pembuatan kebijakan-kebijakan baru;
3. Berbagai lembaga monitoring dan media massa, sebagai masukan bagi pemilihan fokus monitoring dan kontrol;
4. KPPOD sendiri, sebagai bagian dari upaya pengembangan kapasitas, baik dalam exercise kerangka dan metode yang digunakan maupun dalam pengetahuan mengenai fakta otonomi daerah yang menjadi obyek pemantauannya.

II. METODOLOGI

2.1. Desain

Analisis dilakukan dengan mengikuti panduan analisis produk hukum daerah yang sejauh ini dibuat sebagai standar oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Sebagaimana panduan yang diikuti, analisis dilakukan atas obyek Perda, keharmonisan pengaturan-pengaturan yang ada dalam Perda dengan produk hukum di atasnya dan atau produk hukum lainnya, dan efek yang diperkirakan akan ditimbulkan oleh Perda tersebut atas kepentingan umum.

Dengan demikian, paling tidak, ada 3 konsep yang dioperasionalkan, yang sejak awal tidak hendak didefinisikan dengan kaku: obyek, harmoni dengan produk hukum yang lebih tinggi dan atau produk hukum lainnya, dan kepentingan umum. Analisis diberikan ruang yang relatif bebas untuk menangkap persoalan yang terkait dengan ketiga kategori tersebut walaupun dengan tetap memperhatikan beberapa panduan teknis.

Tentang obyek, panduan teknisnya adalah:

- Perhatikan, apakah ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara obyek pungutan dan isi pasal-pasal lainnya;
- Apakah tujuan yang hendak dicapai dengan pemberlakuan produk hukum tersebut sesuai dengan materi atau isi yang diatur dalam Perda; dan

Apakah pasal yang mengatur tentang obyek pajak/retribusi sesuai dengan masing-masing obyek yang dikenakan retribusi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai tarif/dasar pengenaan tarif.

Tentang harmoni dengan produk hukum yang lebih tinggi atau produk hukum lainnya, panduan teknisnya

adalah:

- Periksa kelengkapan yuridis formal dari produk hukum yang dianalisis, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan UU No. 34 Tahun 2000. Apabila ada yang tidak sesuai atau tidak lengkap, tuliskan hak yang tidak sesuai atau tidak lengkap;
- Khusus untuk retribusi, perhatikan apakah produk hukum tersebut mencantumkan golongan retribusi atau tidak. Bila sudah mencantumkan golongan retribusi, apakah golongan retribusi yang sudah dicantumkan sesuai dengan pengertian masing-masing golongan retribusi;
- Periksa, apakah ada pasal-pasal yang saling bertentangan dan atau bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi atau produk hukum lainnya.
- Periksa, apakah obyek yang dikenakan pajak atau retribusi tersebut sesuai dengan prinsip atau filosofi pajak atau retribusi.
- Periksa, apakah obyek yang dikenakan pajak atau retribusi bukan merupakan obyek pajak atau retribusi level pemerintahan di atasnya.

Tentang kepentingan umum, panduan teknisnya adalah:

- Periksa, apakah obyek dan dasar pengenaan pajak atau retribusi tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Analisis kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi jenis-jenis permasalahan dari setiap Perda. Jenis-jenis permasalahan ini dicoba diformulasikan secara bebas, walaupun dengan tetap memperhatikan hasil identifikasi permasalahan pada tahap awal yang sudah dilakukan oleh KPPOD.

Jenis-jenis permasalahan yang kemudian menjadi dasar untuk analisis kuantitatif itu adalah:

1. Hambatan pada lalu lintas perdagangan dalam negeri;
2. Efek pungutan ganda;
3. Validitas sebagai mekanisme pencapaian tujuan yang diklaim;
4. Kejelasan prosedur dan birokrasi;
5. Kejelasan obyek Perda;
6. Kewajaran tarif dan atau struktur tarif;
7. Diskoneksi isi-tujuan;
8. Kelengkapan yuridis;
9. Kepastian masa berlaku izin;
10. Kejelasan hak dan kewajiban subyek pungutan;
11. Kejelasan subyek;
12. Akses masyarakat kecil;
13. Kemitraan yang bersifat wajib;
14. Relevansi acuan yuridis.

Kualifikasi kebermasalahan ditentukan dengan mengacu pada ke-14 jenis permasalahan di atas. Jenis permasalahan 1 sampai 3 masuk dalam kualifikasi bermasalah secara prinsip; jenis permasalahan 4 sampai 13 masuk dalam kualifikasi bermasalah secara substansi; dan jenis permasalahan 14 masuk dalam kualifikasi bermasalah secara teknis. Di luar itu, Perda yang tidak bermasalah dimasukkan dalam kualifikasi tidak bermasalah.

2.2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam analisis ini semata merupakan data sekunder yang berbentuk Peraturan Daerah dan/atau Surat Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Gubernur.

2.3. Gambaran Umum Obyek Analisis

Seluruhnya ada 351 produk hukum, 340 di antaranya adalah peraturan daerah dan sisanya sebanyak 11 adalah SK Bupati dan/atau Keputusan Gubernur. Untuk menjaga kesetaraan obyek yang dianalisis, maka fokus diberikan kepada 340 peraturan daerah.

Dari 340 Perda yang dianalisis, ada 51 Perda (15 %) yang mengatur soal pajak daerah, 233 Perda (69 %) yang mengatur soal retribusi daerah, dan 56 Perda (16 %) yang tidak berkaitan langsung dengan baik pajak maupun retribusi daerah. Untuk mudahnya, kategori yang terakhir ini disebut Perda non-pajak non retribusi.

2.4. Gambaran Persebaran Wilayah dari Obyek Analisis

Perda-Perda yang dianalisis dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Pemerintah Propinsi di 28 propinsi.

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dianalisis bervariasi dari 1 sampai 26 antar-propinsi, dengan jumlah terbanyak (yang dianalisis) ditunjukkan oleh Daerah Istimewa Aceh (27), diikuti oleh Propinsi Jawa Barat (26), Propinsi Banten (25), Propinsi Sumatera Selatan (22), Propinsi Gorontalo, Propinsi Irian Jaya, Propinsi Jambi, Propinsi Jawa Timur (masing-masing berjumlah 20), Propinsi Nusa Tenggara Timur (19), Sumatera Utara (18), dan Kalimantan Timur (16). Dengan gambaran penyebaran propinsi “penghasil” Perda seperti itu, maka, walaupun Perda-Perda yang dianalisis tidak diambil berdasarkan prosedur sampling tertentu yang secara serius mempertimbangkan keterwakilan suatu keadaan umum Indonesia, analisis atas Perda-Perda yang ada, pada tingkat tertentu, dapat memberikan gambaran yang representatif atas keadaan Perda-Perda yang dihasilkan di Indonesia.

Jumlah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang membuat Perda-Perda yang dianalisis juga bervariasi antar-propinsi. Jumlah itu bervariasi dari 1 sampai 10 antar-propinsi, dengan jumlah Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota terbanyak ditunjukkan oleh Propinsi Jawa Barat (10), diikuti Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Nusa Tenggara Timur (masing-masing 7), Propinsi Bali, D.I. Aceh, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Sulawesi Tengah, dan Propinsi Sumatera Utara (masing-masing 5).

III. HASIL ANALISIS TENDENSI KEBERMASALAHAN

3.1. Umum

Dari 340 Perda yang dianalisis, ada 31 % Perda yang tidak bermasalah, 17 % Perda yang bermasalah teknis, 42 % Perda yang bermasalah substansi, dan 10 % Perda yang bermasalah secara prinsip (lihat Tabel 3.1.).

Dengan demikian, secara keseluruhan Perda-Perda yang dianalisis memperlihatkan kecenderungan bermasalah lebih tinggi daripada tidak bermasalah. Ada 31 % Perda yang bermasalah sedangkan sisanya 69 % bermasalah, baik secara prinsip, substansi, maupun teknis.

Kecenderungan ini tetap tampak kuat, bahkan jika kita menggunakan jumlah Perda yang bermasalah substansi dan bermasalah secara prinsip (kualifikasi kebermasalahan 3 dan 4) sebagai indikator. Ada 52 % Perda yang berada pada kualifikasi 3 dan 4, sementara kualifikasi 1 dan 2 hanya didukung 48 % Perda.

Namun demikian, tendensi kebermasalahan yang dilihat dengan menggunakan tolok ukur sederhana ini (besarnya kualifikasi 3 dan 4 dibandingkan dengan besarnya kualifikasi 1 dan 2) bervariasi antar-kelompok. Perda non-pajak non-retribusi memperlihatkan kecenderungan bermasalah paling tinggi (75 %), dibandingkan dengan Perda retribusi yang hanya 49 % dan Perda pajak daerah yang juga 45 %.

Perda-Perda memperlihatkan kecenderungan utama untuk bermasalah secara substansi. Kecenderungan ini diperlihatkan secara konsisten pada ketiga kelompok Perda. Pada Perda pajak daerah, ada 37 % Perda yang bermasalah substansi. Bersama kualifikasi tidak bermasalah, nilai 37 % ini merupakan nilai tertinggi. Pada Perda retribusi daerah, ada 38 % Perda yang memperlihatkan masalah substansi, dan ini merupakan nilai yang tertinggi. Lebih lagi pada Perda non-pajak non-retribusi, ada 66 % yang memperlihatkan masalah substansi.

Perda-Perda dengan kualifikasi tidak bermasalah menempati urutan kedua dari segi jumlah dan berkontribusi 31 % dari keseluruhan Perda. (3)

Tabel 3.1. Perda menurut Kualifikasi Kebermasalahan

No	Kualifikasi Kebermasalahan	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Non Pajak Non Retribusi		Total	
		Jlh.	%	Jlh.	%	Jlh.	%	Jlh.	%
1.	Tidak Bermasalah	19	37	72	31	12	21	103	31
2.	Bermasalah Teknis	9	18	47	20	2	4	58	17
3.	Bermasalah Substansi	19	37	88	38	37	66	144	42
4.	Bermasalah Prinsip	4	8	26	11	5	9	35	10
		51	100	233	100	56	100	340	100

Perbandingan antar-kelompok menunjukkan bahwa Perda-Perda pajak daerah memperlihatkan kecenderungan tidak bermasalah lebih tinggi dibandingkan dengan Perda-Perda retribusi daerah dan Perda-Perda non-pajak non-retribusi.

Kualifikasi bermasalah secara prinsip merupakan kualifikasi dengan jumlah Perda paling sedikit (10 %). Akan tetapi, tentu saja signifikansi kualifikasi kebermasalahan ini tidak boleh diabaikan. Perbandingan antar-kelompok menunjukkan bahwa Perda retribusi memperlihatkan kecenderungan bermasalah secara prinsip paling tinggi, diikuti Perda non-pajak non-retribusi, dan akhirnya Perda pajak.

Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip, sebagaimana diasumsikan dalam penelitian ini, adalah Perda-Perda yang memperlihatkan permasalahan dalam hal hambatan terhadap lalu lintas perdagangan, efek pungutan ganda yang ditimbulkan, dan validitas Perda sebagai mekanisme dalam mencapai tujuan yang diklaim. Dari 35 Perda yang bermasalah secara prinsip, Ada 46 % Perda memperlihatkan permasalahan dalam hal hambatan terhadap lalu lintas perdagangan, 37 % dalam hal efek pungutan ganda yang ditimbulkan, dan 31 % dalam hal validitas sebagai mekanisme dalam mencapai tujuan yang diklaim (Tabel 3.2.).

Tabel 3.2. Jenis-Jenis Permasalahan Perda yang Bermasalah Prinsip

No	Jenis Permasalahan	Perda Pajak	Perda Retribusi	Non Pajak Non Retribusi	Total (n=35)	
					Jumlah	%
1.	Hambatan Perdagangan	1	12	3	16	46
2.	Pungutan Ganda	3	7	3	13	37
3.	Validitas	-	9	2	11	31

Perda-Perda yang bermasalah substansi memperlihatkan jenis permasalahan yang lebih bervariasi. Pada Tabel 3.3. dicantumkan jenis-jenis permasalahan yang menonjol. Detailnya dapat dilihat pada penjelasan tiap bagian, akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa persoalan kewajaran tarif dan atau struktur tarif, kejelasan birokrasi, kejelasan pengaturan hak dan kewajiban para wajib pungutan, dan kejelasan obyek merupakan permasalahan-permasalahan substansi yang penting.

Tabel 3.3. Jenis-Jenis Permasalahan Perda yang Bermasalah Substansi

No	Jenis Permasalahan	Perda Pajak	Perda Retribusi	Non Pajak Non Retribusi	Total (n=195)	
					Jumlah	%
1.	Kewajaran Tarif/ Struktur Tarif	11	31	3	45	23
2.	Kejelasan Obyek	5	27	2	34	17
3.	Kejelasan Birokrasi	-	24	16	40	21
4.	Kejelasan Hak dan Kewajiban Wajib Pungutan	3	18	20	41	21
5.	Kelengkapan Yuridis	1	9	3	13	7
6.	Diskoneksi Isi-Tujuan	-	9	1	10	5
7.	Masa Laku Izin	-	7	2	9	5
8.	Kejelasan Subyek	1	5	1	7	4
9.	Fokus	11	-	-	11	6

Ada juga variasi antar-kelompok. Sementara persoalan kewajaran tarif merupakan persoalan yang paling menonjol pada Perda pajak dan Perda retribusi, persoalan kejelasan hak dan kewajiban wajib pungutan merupakan persoalan yang paling menonjol pada Perda non-pajak non-retribusi. Juga, sementara persoalan kejelasan birokrasi tidak terlihat pada Perda pajak daerah, persoalan ini justru menonjol pada Perda retribusi daerah dan Perda non-pajak non-retribusi.

Pada berbagai bagian dalam analisis ini juga akan dikemukakan perbedaan tampilan antara jenis-jenis Perda yang disarankan oleh peraturan perundangan yang di atasnya (terutama PP 65/2001 tentang Pajak Daerah dan Perda 66/2001 tentang Retribusi Daerah) dan jenis-jenis Perda yang tidak termasuk yang disarankan. Analisis-analisis itu memperlihatkan kecenderungan bermasalah lebih tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis Perda yang disarankan.

Tabel 3.4. Perbandingan antara Perda-Perda yang Listed dan Non-Listed dalam PP 66/2001

	Kualifikasi Kebermasalahan	Listed				Non-Listed				
		A	B	Jl.	%	A	B	C	Jl.	%
1.	Tidak Bermasalah	15	65	80	39	4	7	12	23	17
2.	Bermasalah Teknis	9	43	52	25	-	4	2	6	5
3.	Bermasalah Substansi	18	51	69	34	1	37	37	75	56
4.	Bermasalah Prinsip	2	3	5	2	2	23	5	30	22
	Total	44	162	206	100	7	71	56	134	100

Keterangan: A: Perda pajak daerah; B: Perda retribusi daerah; C: Perda non-pajak non retribusi; Jl.: jumlah.

3.2. Perda Pajak Daerah

Dari 51 Perda pajak daerah yang dianalisis, 44 di antaranya termasuk yang disarankan PP 65/2001 dan 7 di antaranya yang tidak disarankan.

Secara keseluruhan, dari 51 Perda tersebut, ada 8 % Perda yang bermasalah secara prinsip, 37 % Perda yang bermasalah substansi, 18 % Perda yang bermasalah teknis, dan 37 % Perda yang tak bermasalah.

Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip memperlihatkan persoalan dalam efek pungutan ganda yang ditimbulkan (3 Perda) dan pelanggaran prin-

Tabel 3.5. Tendensi kebermasalahan Perda-Perda Pajak Daerah

No.	Kualifikasi Kebermasalahan	Jumlah sub-kelompok				Jumlah (Jlh. A + Jlh. B)	Persentase
		Listed dalam PP 65/2001		Non-Listed dalam PP 65/2001			
		Jlh. A	%	Jlh. B	%		
1.	Tidak Bermasalah	15	34	4	57	19	37
2.	Bermasalah Teknis Perlu Revisi	9	20	-	-	9	18
3.	Bermasalah Substansi Perlu Revisi	18	41	1	14	19	37
4.	Bermasalah Prinsip Perlu Dibatalkan	2	5	2	29	4	8
	Total	44	100	7	100	51	100

sip *internal free trade* (1 Perda).

Keempat Perda yang bermasalah secara prinsip tersebut adalah:

1. Perda Kota Cirebon No. 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
2. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 15 Tahun 2001 tentang Pajak Perusahaan Industri Daerah;
3. Perda Kota Padang No. 27 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C;
4. Perda Kabupaten Tolitoli No. 25 Tahun 2001 tentang Pajak Komoditi;

Perda-Perda yang bermasalah substansi (19 Perda) memperlihatkan persoalan dalam hal kewajaran tarif dan struktur tarif (11 Perda), kejelasan obyek (5 Perda), kejelasan isi (3 Perda), kelengkapan yuridis (1 Perda), kejelasan subyek (1 Perda), dan relevansi acuan yuridis (8 Perda). Sementara 9 Perda yang bermasalah teknis memperlihatkan persoalan dalam relevansi acuan yuridis yang digunakan (Lihat Tabel 3.6.)

Tabel 3.6. Jenis Pelanggaran Perda-Perda Pajak Daerah

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah (n=51)	Persentase (%)
1.	<i>Free internal trade</i>	1	2
2.	<i>Double taxation</i>	3	6
3.	Validity	-	-
4.	Monopoli	-	-
5.	Birokrasi Perizinan	-	-
6.	Kejelasan Obyek	5	10
7.	Kewajaran Tarif	11	22
8.	Diskoneksi isi-tujuan	-	-
9.	Kelengkapan Yuridis	1	2
10.	Masa Laku Izin	-	-
11.	Hak dan Kewajiban Wajib Retribusi	3	6
12.	Kejelasan Subyek	1	2
13.	Akses Masyarakat Kecil	-	-
14.	Kemitraan Wajib	-	-
15.	<i>Double taxation</i> sebagian obyek	-	-
16.	Judul	-	-
17.	Acuan yuridis	17	33
18.	Tidak ada masalah	19	37

Secara umum Perda pajak daerah lebih memperlihatkan kecenderungan tidak bermasalah daripada bermasalah. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa 55 % Perda menunjukkan kualifikasi tidak bermasalah dan bermasalah teknis (masing-masing 37 % dan 18 %). Kecenderungan ini berlaku baik untuk Perda pajak daerah yang *Listed* maupun yang *non-Listed* dalam PP 65/2001.

Pembedaan pajak daerah yang *Listed* dan *non-Listed* dengan demikian tidak relevan dalam kaitan dengan tendensi kebermasalahan Perda pajak daerah.

3.3. Perda Retribusi Daerah

Dari 233 Perda retribusi daerah yang dianalisis, 31 % di antaranya tidak bermasalah, 20 % bermasalah teknis, 38 % bermasalah substansi, dan 11 % bermasalah secara prinsip.

Perda-Perda retribusi daerah yang tidak bermasalah lebih banyak ditemukan pada golongan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Pada golongan retribusi jasa umum terdapat 21 Perda yang tidak bermasalah, yang merupakan 50 % dari keseluruhan Perda retribusi jasa umum. 31 Perda retribusi lainnya yang tidak bermasalah ditemukan di golongan retribusi jasa usaha, yang merupakan 42 % dari keseluruhan Perda retribusi jasa usaha. Pada golongan retribusi perizinan tertentu ditemukan hanya 15 Perda yang tidak bermasalah, yang merupakan 17 % dari keseluruhan Perda retribusi perizinan tertentu. Pada Perda-Perda retribusi di luar ketiga golongan tersebut, tidak ditemukan Perda yang tidak bermasalah.

Pada kedua subkelompok Perda retribusi daerah yang disebut terakhir (perizinan tertentu dan subkelompok di luar ketiga golongan) justru banyak ditemukan Perda dengan kualifikasi bermasalah secara prinsip dan bermasalah substansi. Seluruh 19 Perda retribusi di luar 3 golongan memperlihatkan sifat kebermasalahan pada kedua kualifikasi tersebut. Sedangkan pada retribusi perizinan tertentu, ada 70 % yang memperlihatkan kedua sifat kebermasalahan yang serius ini.

Tampilan ini berbeda secara signifikan dengan Perda-Perda retribusi jasa umum dan Perda-Perda retribusi jasa usaha. Kedua kualifikasi kebermasalahan (prinsip dan substansi) ini hanya merupakan 29 % dari Perda retribusi jasa umum dan 27 % dari Perda retribusi jasa usaha (Lihat Tabel 3.7.).

Dengan demikian, yang paling signifikan berkontribusi permasalahan pada Perda retribusi daerah adalah Perda-Perda yang termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu dan Perda-Perda yang tidak

termasuk dalam 3 golongan yang disebut dalam PP No. 66 Tahun 2001.

Di luar persoalan-persoalan prinsip (pelanggaran prinsip *free internal trade*, *double taxation*, dan validitas Perda sebagai mekanisme pencapaian tujuan yang diklaim), dan di luar persoalan teknis relevansi acuan yuridis yang digunakan, terdapat berbagai jenis persoalan substansi.

Tabel 3.7. Tendensi Kebermasalahan Perda-Perda Retribusi Daerah

No	Kualifikasi Kebermasalahan	J. Umum		J. Usaha		Perij. T		Lain-Lain		Total	
		Jlh.	%	Jlh.	%	Jlh.	%	Jlh.	%	Jlh.	%
1.	Tidak Bermasalah	21	50	36	42	15	17	-	-	72	31
2.	Bermasalah teknis	9	21	27	31	11	13	-	-	47	20
3.	Bermasalah Substansi	8	19	19	22	53	62	8	42	88	38
4.	Bermasalah Prinsip	4	10	4	5	7	8	11	58	26	11
		42	100	86	100	86	100	19	100	233	100

Setiap golongan retribusi memperlihatkan cakupan jenis persoalan dan jenis persoalan dominan yang berbeda. Golongan Perda retribusi jasa umum memperlihatkan hanya 3 jenis permasalahan substansi yakni kejelasan obyek yang diatur, kelengkapan yuridis, dan kewajaran tarif.

Golongan Perda retribusi jasa usaha memperlihatkan 5 jenis permasalahan substansi, dengan jenis persoalan yang dominan adalah kejelasan obyek, kewajaran tarif, dan kejelasan subyek.

Golongan Perda retribusi perizinan tertentu memperlihatkan jenis permasalahan yang paling bervariasi (11 jenis), dengan jenis permasalahan yang dominan adalah kewajaran tarif dan atau struktur tarif, kejelasan birokrasi perizinan, dan kejelasan pengaturan hak dan kewajiban wajib retribusi.

Perda retribusi yang tidak termasuk dalam ketiga golongan di atas memperlihatkan 8 jenis permasalahan, dengan jenis permasalahan yang dominan adalah prosedur perizinan, kewajaran tarif, kejelasan obyek, serta kejelasan hak dan kewajiban wajib pungutan.

Tabel 3.8. memberikan gambaran mengenai jenis-jenis permasalahan tersebut, yang gambaran lebih detailnya dapat dilihat pada pembahasan masing-masing jenis Perda retribusi daerah.

Pada Perda-Perda retribusi daerah juga dapat diamati perbedaan antara Perda-Perda yang disarankan oleh peraturan perundangan yang ada di atasnya dan Perda-Perda yang tidak disarankan peraturan yang di atasnya (Tabel 3.9.).

Tabel 3.8. Jenis-Jenis Permasalahan Perda Retribusi yang Bermasalah Substansi

No	Jenis Permasalahan	Jasa Umum	Jasa Usaha	Perij. T	Lain-Lain	Total (n=88)	
						Jumlah	%
1.	Kewajaran Tarif/ Struktur Tarif	2	5	21	3	31	35
2.	Kejelasan Obyek	5	9	11	2	27	31
3.	Kejelasan Birokrasi	-	-	20	4	24	27
4.	Kejelasan Hak dan Kewajiban Wajib Pungutan	-	3	13	2	18	20
5.	Kelengkapan Yuridis	4	-	4	1	9	10
6.	Diskoneksi Isi-Tujuan	-	-	8	1	9	10
7.	Masa Laku Izin	-	-	7	-	7	8
8.	Kejelasan Subyek	-	4	1	-	5	6

Tabel 3.9. Perbandingan antara Perda-Perda Retribusi Daerah yang Listed dan Non-Listed dalam PP 66/2001

	Kualifikasi Kebermasalahan	Listed di PP 66/2001					Non-Listed					
		A	B	C	Jl.	%	A	B	C	D	Jl.	%
1.	Tidak Bermasalah	21	36	8	65	40	-	-	7	-	7	10
2.	Bermasalah Teknis	9	27	7	43	27	-	-	4	-	4	6
3.	Bermasalah Substansi	8	19	24	51	31	-	-	29	8	37	52
4.	Bermasalah Prinsip	-	3	-	3	2	4	1	7	11	23	32
		38	85	39	162	100	4	1	47	19	71	100

Keterangan: A: Perda Retribusi Jasa Umum; B: Perda retribusi jasa usaha; C: Perda retribusi perizinan tertentu; D: Perda retribusi di Luar 3 golongan; Jl.: jumlah.

Dibandingkan dengan yang non-Listed, Perda-Perda yang disarankan oleh PP 66/2001 lebih memperlihatkan kecenderungan tidak bermasalah daripada yang tidak disarankan (40 % berbanding 10 %). Hal ini juga dikonfirmasi oleh *share* Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip dan substansi dari kedua kategori. Perda-Perda yang tidak disarankan memperlihatkan *share* 84 % pada kualifikasi bermasalah prinsip dan bermasalah substansi, sementara Perda-Perda yang disarankan menunjukkan *share* hanya 33 %.

Selengkapnya gambaran kebermasalahan setiap golongan Perda retribusi daerah dapat dipaparkan secara lebih detail di bawah ini.

3.2.1. Retribusi Jasa Umum

Secara keseluruhan, dari 42 Perda retribusi jasa umum yang dianalisis, ada 10 % Perda yang bermasalah secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, 19 % Perda yang bermasalah substansi dan perlu direvisi, 21 % Perda bermasalah teknis dan perlu direvisi, dan 50 % Perda yang tidak bermasalah

Tabel 3.10. Tendensi kebermasalahan Perda Retribusi Jasa Umum

No.	Kualifikasi Kebermasalahan	Jumlah sub-kelompok				Jumlah (Jlh. A + Jlh. B)	Persentase
		Listed dalam PP 66/2001		Non-Listed dalam PP 66/2001			
		Jlh. A	%	Jlh. B	%		
1.	Tidak Bermasalah	21	55	-	-	21	50
2.	Bermasalah Teknis Perlu Revisi	9	24	-	-	9	21
3.	Bermasalah Substansi Perlu Revisi	8	21	-	-	8	19
4.	Bermasalah Prinsip Perlu Dibatalkan	-	-	4	100	4	10
	Total	38	100	4	100	42	100

Pembedaan antara Perda yang *Listed* dan yang non-*Listed* dalam PP 66/2001, sekalipun dengan jumlah Perda setiap subkelompok yang tidak berimbang, dapat dilihat sebagai hal yang menarik. Kesemua (4) Perda yang tidak disarankan PP 66/2001 adalah Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip sehingga dipandang perlu untuk dibatalkan. Sementara pada sub-kelompok Perda yang *Listed* dalam PP 66/2001 tidak ditemukan kualifikasi ke-bermasalahan ini.

Keempat Perda yang bermasalah secara prinsip ini sebetulnya diklaim saja (dalam pasal mengenai golongan retribusi) masuk dalam golongan retribusi jasa umum. Apabila dilihat lebih cermat, keempat Perda lebih mirip ke retribusi perizinan tertentu. Keempat Perda tersebut memperlihatkan persoalan dalam hal pungutan ganda (2 Perda), hambatan terhadap *free internal trade* (1 Perda), dan validitas pengaturan yang ada dalam mencapai tujuan yang diklaim (1 Perda) (Lihat Tabel 3.11.).

Keempat Perda yang bermasalah secara prinsip adalah:

1. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No. 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Kartu Ternak;
2. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No. 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Membawa Hasil Perkebunan Keluar Daerah;
3. Perda Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Jalan untuk Angkutan Barang;
4. Perda Kabupaten Tasikmalaya No. 32 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemberian Izin dan Biaya Pembongkaran Reklame.

Delapan (8) Perda yang bermasalah secara substansi memperlihatkan persoalan dalam hal kejelasan obyek yang diatur (12 %), kelengkapan yuridis (10 %), relevansi acuan yuridis (atau 10 %), dan kewajaran tarif dan struktur tarif (5 %). Sembilan (9) Perda (21 %) yang bermasalah secara teknis berkaitan dengan relevansi acuan yuridis yang digunakan. Dengan demikian persoalan substansi hanya menyebar di 3 jenis persoalan: kejelasan obyek, kelengkapan yuridis, dan kewajaran tarif dan struktur tarif.

Dapat dikatakan bahwa Perda-Perda Retribusi jasa umum yang dianalisis mempunyai kecenderungan tidak bermasalah lebih besar daripada bermasalah. Diwakili oleh kualifikasi bermasalah secara prinsip dan bermasalah substansi, ada 29 % Perda yang cenderung bermasalah. Sisanya 71 % cenderung tidak bermasalah (diwakili oleh kualifikasi bermasalah secara teknis dan tidak bermasalah).

Persoalan serius justru ditemukan pada Perda-Perda yang diklaim sebagai Perda retribusi jasa umum

Tabel 3.11. Jenis Pelanggaran Perda-Perda Retribusi Jasa Umum

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah (n=42)	Persentase (%)
1.	<i>Free internal trade</i>	1	2
2.	<i>Double taxation</i>	2	5
3.	Validity	1	2
4.	Monopoli	-	-
5.	Birokrasi Perizinan	-	-
6.	Kejelasan Obyek	5	12
7.	Kewajaran Tarif	2	5
8.	Diskoneksi isi-tujuan	-	-
9.	Kelengkapan Yuridis	4	10
10.	Masa Laku Izin	-	-
11.	Hak dan Kewajiban Wajib Retribusi	-	-
12.	Kejelasan Subyek	-	-
13.	Akses Masyarakat Kecil	-	-
14.	Kemitraan Wajib	-	-
15.	<i>Double taxation</i> sebagian obyek	-	-
16.	Judul	-	-
17.	Acuan yuridis	13	31
18.	Tidak ada masalah	21	50

tetapi yang cirinya lebih mendekati retribusi perizinan tertentu. Perda-Perda retribusi jasa umum jenis ini semuanya bermasalah secara prinsip.

3.2.2. Retribusi Jasa Usaha

Secara keseluruhan, dari 86 Perda retribusi jasa usaha yang dianalisis, ada 5 % Perda yang bermasalah secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, 22 % Perda yang bermasalah secara substansi sehingga perlu direvisi, 31 % Perda yang bermasalah secara teknis tetapi yang perlu direvisi, dan 42 % Perda yang tidak bermasalah sama sekali.

Pembedaan antara Perda yang *Listed* dan yang non-*Listed* dalam PP 66/2001 tidak bisa dianggap dapat dicerminkan dalam tabel di atas, karena hanya ada 1 Perda retribusi jasa usaha yang masuk dalam kategori non-*Listed*. Semua yang lainnya termasuk yang disarankan PP 66/2001.

Tabel 3.12. Tendensi ke-bermasalahan Perda Retribusi Jasa Usaha

No.	Kualifikasi Kebermasalahan	Jumlah sub-kelompok				Jumlah (Jlh. A + Jlh. B)	Persentase
		Listed dalam PP 66/2001		Non-Listed dalam PP 66/2001			
		Jlh. A	%	Jlh. B	%		
1.	Tidak Bermasalah	36	42	-	-	36	42
2.	Bermasalah Teknis Perlu Revisi	27	32	-	-	27	31
3.	Bermasalah Substansi Perlu Revisi	19	22	-	-	19	22
4.	Bermasalah Prinsip Perlu Dibatalkan	3	4	1	100	4	5
	Total	85	100	1	100	86	100

Empat (4) Perda yang bermasalah secara prinsip memperlihatkan persoalan dalam hal pungutan ganda, validitas pengaturan yang ada dalam mencapai tujuan yang diklaim, serta sifatnya yang mendukung monopoli. Tidak ditemukan adalah pelanggaran prinsip *free internal trade* dalam keempat Perda ini.

Keempat Perda yang bermasalah secara prinsip adalah:

1. Perda Kabupaten Aceh Timur No. 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Usaha Perkebunan;
Perda ini disebutkan masuk golongan retribusi jasa usaha, padahal yang dilakukan adalah pungutan terhadap hasil perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Bukan pembayaran atas hasil perkebunan yang dikelola oleh Pemda. Dengan demikian, walaupun tarif yang ditetapkan relatif tidak memberatkan, pungutan jenis ini akan merupakan tambahan pungutan terhadap obyek yang sama, pada terhadap obyek ini sudah (semestinya) dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Perda Kabupaten Bekasi No. 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus;
3. Perda Kabupaten Cirebon No. 54 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
4. Perda Kabupaten Merangin No. 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Sembilan belas (19) Perda yang bermasalah secara substansi memperlihatkan persoalan dalam hal kejelasan obyek yang diatur, kewajiban tarif dan struktur tarif, kejelasan subyek retribusi, kejelasan isi, relevansi acuan yuridis, dan representasi judul. Sedangkan 27 Perda yang bermasalah secara teknis berkaitan dengan relevansi acuan yuridis yang digunakan.

Secara umum, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.13., Perda-Perda retribusi jasa usaha yang dianalisis lebih banyak memperlihatkan persoalan teknis dalam hal relevansi acuan yuridis yang digunakan (40 %). Persoalan relevansi acuan yuridis ini tidak banyak berkorelasi dengan persoalan substansi, seperti yang diperlihatkan oleh kenyataan bahwa 31 % Perda adalah Perda-Perda yang bermasalah secara teknis tapi tidak bermasalah secara substansi.

Persoalan substansi hanya menyebar di 5 jenis persoalan, yakni kejelasan obyek, kewajiban tarif dan struktur tarif, kejelasan subyek, kejelasan isi, dan representasi judul, dengan komposisi masing-masing 10 %, 6 %, 5 %, 4 %, dan 1 % dari jumlah Perda retribusi jasa usaha yang dianalisis.

Dapat dikatakan bahwa Perda-Perda Retribusi jasa usaha yang dianalisis mempunyai kecenderungan tidak

Tabel 3.13. Jenis Pelanggaran Perda-Perda Retribusi Jasa Usaha

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah (n=86)	Persentase
1.	<i>Free internal trade</i>	-	-
2.	<i>Double taxation</i>	1	1
3.	Validity	3	4
4.	Monopoli	1	1
5.	Birokrasi Perizinan	-	-
6.	Kejelasan Obyek	9	10
7.	Kewajaran Tarif	5	6
8.	Diskoneksi isi-tujuan	-	-
9.	Kelengkapan Yuridis	-	-
10.	Masa Laku Izin	-	-
11.	Hak dan Kewajiban Wajib Retribusi	3	4
12.	Kejelasan Subyek	4	5
13.	Akses Masyarakat Kecil	-	-
14.	Kemitraan Wajib	-	-
15.	<i>Double taxation</i> sebagian obyek	-	-
16.	Judul	1	1
17.	Acuan yuridis	34	40
18.	Tidak ada masalah	36	42

bermasalah lebih besar daripada bermasalah. Diwakili oleh kualifikasi bermasalah secara prinsip dan bermasalah substansi, ada 27 % Perda yang cenderung bermasalah. Sisanya 73 % cenderung tidak bermasalah (diwakili oleh kualifikasi bermasalah secara teknis dan tidak bermasalah).

3.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Analisis tendensi kebermasalahannya kelompok Perda retribusi perizinan tertentu dapat dibedakan antara jenis Perda yang disarankan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 (PP 66/2001) dan jenis Perda yang tidak disarankan PP 66/2001.

Dari 86 Perda Retribusi Daerah yang masuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu, ada 39 Perda yang merupakan jenis retribusi perizinan tertentu yang disarankan PP 66/2001 dan 47 Perda yang tidak termasuk yang disarankan PP 66/2001.

Secara keseluruhan, dari 86 Perda retribusi perizinan tertentu yang dianalisis, ada 8 % Perda yang bermasalah secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, 62 % Perda yang bermasalah substansi sehingga perlu revisi, 13 % Perda yang bermasalah teknis dan perlu revisi, dan 17 % Perda yang tidak bermasalah.

Tujuh (7) Perda bermasalah secara prinsip karena merintang arus lalu lintas perdagangan barang dan jasa (3 Perda), bukan merupakan mekanisme yang valid untuk mencapai tujuan yang diklaim (3 Perda), dan menimbulkan pungutan berganda karena terhadap obyek yang sama telah dikenakan pungutan lain-

nya (1 Perda). Ketujuh Perda yang bermasalah secara prinsip ini masuk dalam kelompok yang tidak disarankan PP 66/2001.

Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip tersebut adalah:

1. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No.10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Kepemilikan Gergaji Rantai;
2. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No.22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengeluaran Hewan Ternak Keluar Kabupaten;
3. Perda Kabupaten Deli Serdang No.17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan;
4. Perda Kabupaten Gorontalo No.63 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
5. Perda Propinsi Lampung No.06 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi;
6. Perda Kabupaten Biak Numfor No.13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
7. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No.20 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Lalu Lintas Hasil Buah-Buahan/Hortikultura dan Buah Kelapa Sawit.

Ada 53 Perda yang bermasalah secara substansi, karena tarif dan struktur tarif yang tidak wajar atau kurang berdasar (21 Perda), birokrasi perizinan yang tidak jelas (20 Perda), pengaturan soal hak dan kewajiban wajib retribusi yang tidak jelas (13 Perda), pernyataan obyek retribusi yang kabur (11 Perda), tidak ada imbal balik yang jelas dari pembayaran retribusi (8 Perda), masa laku izin yang tidak jelas dan/atau tidak wajar (7 Perda), persyaratan yuridis yang tidak dipenuhi (4 Perda), dan tidak diperhatikannya akses kelompok masyarakat kecil (3 Perda). Dari 53 Perda tersebut, ada 24 Perda termasuk kelompok jenis Perda yang disarankan PP 66/2001 dan 29 Perda yang di luar yang disarankan.

Ada 11 Perda yang bermasalah ringan, yakni yang menggunakan referensi yuridis yang kedaluwarsa. Tujuh masuk dalam kelompok jenis Perda yang disarankan PP 66/2001 dan 4 lainnya tidak termasuk yang disarankan. Sisanya, 15 Perda, tidak bermasalah. Delapan berasal dari kelompok jenis Perda yang disarankan PP 66/2001 dan 7 tidak termasuk kelompok jenis Perda yang disarankan.

Tendensi kebermasalahan selengkapya dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Tendensi kebermasalahan Perda Retribusi Perizinan Tertentu

No.	Kualifikasi Kebermasalahan	Jumlah sub-kelompok				Jumlah (Jlh. A + Jlh. B)	Persentase
		Listed dalam PP 66/2001		Non-Listed dalam PP 66/2001			
		Jlh. A	%	Jlh. B	%		
1.	Tidak Bermasalah	8	20	7	15	15	17
2.	Bermasalah Teknis Perlu Revisi	7	18	4	8	11	13
3.	Bermasalah Substansi Perlu Revisi	24	62	29	62	53	62
4.	Bermasalah Prinsip Perlu Dibatalkan	-	-	7	15	7	8
	Total	39	100	47	100	86	100

Tabel di atas juga memperlihatkan perbedaan tendensi kebermasalahan antara jenis Perda yang disarankan PP 66/2001 dan jenis Perda yang tidak disarankan PP 66/2001. Ada 7 Perda non-listed yang bermasalah prinsip dan karena itu perlu dibatalkan, sementara tidak ditemukan kualifikasi kebermasalahan ini pada kelompok listed. Juga, jika pada kelompok listed ada 77 % yang bermasalah secara prinsip dan substansi (kualifikasi 3 dan kualifikasi 4), maka pada kelompok listed hanya ditemukan 62 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perda-Perda Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak disarankan dalam PP 66/2001 memperlihatkan kecenderungan bermasalah lebih tinggi daripada Perda-Perda Retribusi Perizinan tertentu yang disarankan oleh peraturan pemerintah termaksud.

Perbedaan tendensi kebermasalahan juga dapat dilihat lebih rinci pada jenis pelanggaran yang ditunjukkan oleh Perda-Perda Retribusi Perizinan Tertentu yang dianalisis (Lihat Tabel 3.15.). Tiga jenis pelanggaran prinsip (*free internal trade*, *double taxation*, dan *validity*) ditemukan dalam jenis Perda yang tidak disarankan PP 66/2001, tetapi sebaliknya tidak ditemukan dalam jenis Perda yang disarankan PP 66/2001.

Di luar persoalan relevansi acuan yuridis yang digunakan, dapat diamati bahwa persoalan ketidakjelasan birokrasi perizinan, ketidakjelasan perumusan obyek retribusi, dan kurang jelasnya hubungan antara isi Perda dan tujuan yang diklaim hendak dicapai, lebih meluas di kelompok Perda non-listed daripada kelompok Perda listed. Di sisi lain, masalah kewajaran tarif dan kejelasan perumusan hak dan kewajiban wajib retribusi lebih banyak ditemukan di kelompok listed daripada kelompok non-listed. Dengan demikian, pengacuan Perda pada saran PP 66/2001, walaupun meniadakan persoalan kejelasan perumusan obyek retribusi dalam proses pembuatan Perda, masih menyisakan persoalan yang cukup signifikan pada kewajaran tarif dan/atau struktur tarif dan kejelasan perumusan hak dan kewajiban wajib retribusi.

Di luar perbedaan antara kedua kelompok Perda, listed dan non-listed, secara keseluruhan persoalan kewajaran tarif, relevansi acuan

Tabel 3.15. Jenis Pelanggaran Perda-Perda Retribusi Perizinan Tertentu

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah sub-kelompok				Jumlah (Jlh. A + Jlh. B) (n=86)	Persentase
		Listed dalam PP 66/2001 (n=39)		Non-Listed dalam PP 66/2001 (n=47)			
		Jlh. A	%	Jlh. B	%		
1.	Free internal trade	-	-	3	6	3	3
2.	Double taxation	-	-	1	2	1	1
3.	Validity	-	-	3	6	3	3
4.	Birokrasi Perizinan	5	13	15	32	20	23
5.	Kejelasan Obyek	-	-	11	23	11	13
6.	Kewajaran Tarif	13	33	8	17	21	24
7.	Diskoneksi isi-tujuan	2	5	6	13	8	9
8.	Kelengkapan Yuridis	1	3	3	6	4	5
9.	Masa Laku Izin	3	8	4	9	7	8
10.	Hak dan Kewajiban Wajib Retribusi	9	23	4	9	13	15
11.	Kejelasan Subyek	-	-	1	2	1	1
12.	Akses Masyarakat Kecil	1	3	2	4	3	3
13.	Kemitraan Wajib	-	-	1	2	1	1
14.	Double taxation sebagian obyek	-	-	1	2	1	1
15.	Acuan yuridis	15	38	6	13	21	24
16.	Tidak ada masalah	8	21	7	15	15	17

yuridis, birokrasi perizinan, kejelasan hak dan kewajiban wajib retribusi, dan kejelasan obyek retribusi adalah persoalan-persoalan yang paling meluas dari Perda-Perda retribusi perizinan tertentu.

3.2.4. Perda Retribusi Non 3 Golongan

Ada 19 Perda retribusi daerah yang tidak masuk dalam salah satu golongan yang disebut dalam PP 61/2001. Dari 19 Perda tersebut, ada 58 % Perda yang bermasalah secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, dan sisanya 42 % yang bermasalah substansi dan perlu direvisi. Tidak ada Perda yang tidak bermasalah, dan tidak ada Perda yang hanya bermasalah teknis (Lihat Tabel 3.16.)

Tabel 3.16. Tendensi kebermaslahan Perda Retribusi Non 3 Golongan

No.	Kualifikasi Kebermaslahan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak Bermasalah	-	-
2.	Bermasalah Teknis Perlu Revisi	-	-
3.	Bermasalah Substansi Perlu Revisi	8	42
4.	Bermasalah Prinsip Perlu Dibatalkan	11	58
	Total	19	100

Sebelas (11) Perda yang bermasalah secara prinsip memperlihatkan persoalan dalam hal pelanggaran prinsip *free internal trade* (8 Perda), validitas pengaturan yang ada sebagai mekanisme pencapaian tujuan yang diklaim (4 Perda), serta efek pungutan ganda yang ditimbulkan (Lihat Tabel 3.17.).

Kesebelas Perda yang bermasalah secara prinsip adalah:

1. Perda Kabupaten Aceh Tengah No.10 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Hutan Ikutan;
2. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan No.23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak dan Bahan Asal Hewan Ternak ke Luar Daerah;
3. Perda Kota Bogor No.04 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemasukan dan Penampungan serta Pengeluaran Hewan/Ternak;
4. Perda Kabupaten Gorontalo No.64 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengamanan, Pengawasan, dan Pembinaan Peternakan;
5. Perda Kabupaten Indramayu No.11 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Bongkar Muat Barang;
6. Perda Propinsi Lampung No.08 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengangkutan Bahan Galian Batubara, Bahan Baku Semen, dan Barang-Barang Potensial lainnya;
7. Perda Kabupaten Pasaman No.02 Tahun 2001 tentang Retribusi Asal Komoditas;
8. Perda Kabupaten Sanggau No.09 Tahun 2000 tentang Retribusi Angkutan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Inti Sawit (PK), dan Minyak Kelapa Sawit (CPO);
9. Perda Kabupaten Serang No.07 Tahun 2001 tentang Retribusi Kayu;
10. Perda Propinsi Sulawesi Selatan No. 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Pengeluaran dan Pemasukan Ikan;
11. Perda Kabupaten Tolitoli No. 26 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.

Tabel 3.17. Jenis Pelanggaran Perda-Perda Retribusi Non 3 Golongan

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah (n=19)	Persentase
1.	<i>Free internal trade</i>	8	42
2.	<i>Double taxation</i>	1	5
3.	Validity	4	21
4.	Monopoli	-	-
5.	Birokrasi Perizinan	4	21
6.	Kejelasan Obyek	2	11
7.	Kewajaran Tarif	3	16
8.	Diskoneksi isi-tujuan	1	5
9.	Kelengkapan Yuridis	1	5
10.	Masa Laku Izin	-	-
11.	Hak dan Kewajiban Wajib Retribusi	2	11
12.	Kejelasan Subyek	-	-
13.	Akses Masyarakat Kecil	-	-
14.	Kemitraan Wajib	-	-
15.	<i>Double taxation</i> sebagian obyek	1	5
16.	Judul	2	11
17.	Acuan yuridis	-	-
18.	Tidak ada masalah	-	-

Delapan (8) Perda yang bermasalah secara substansi memperlihatkan persoalan dalam hal kejelasan prosedur (4), kewajaran tarif dan struktur tarif (3), kejelasan obyek yang diatur (2), kejelasan gambaran hak dan kewajiban wajib retribusi (2), kejelasan judul (2), koneksi antara isi dan tujuan yang diklaim (1), kelengkapan yuridis (1), dan pungutan ganda sebagian obyek (1).

Secara umum, Perda-Perda retribusi non 3 golongan sebagaimana yang disarankan PP 66/2001 memperlihatkan kecenderungan bermasalah daripada tidak bermasalah. Ini ditunjukkan dari penyebaran ke-19 Perda hanya pada dua kualifikasi kebermasalahan, yakni bermasalah secara prinsip perlu dibatalkan dan bermasalah substansi perlu revisi.

3.3. Perda Non-Pajak Non-Retribusi

Ada 56 Perda non-pajak non-retribusi yang dianalisis, dan, dari ke-56 Perda tersebut, ada 9 % Perda yang bermasalah secara prinsip sehingga perlu dibatalkan, 66 % Perda yang bermasalah substansi sehingga perlu direvisi, 4 % Perda yang bermasalah teknis dan perlu direvisi, dan 21 % Perda yang tidak bermasalah.

Kelima Perda yang bermasalah secara prinsip memperlihatkan persoalan dalam efek pungutan ganda yang ditimbulkan (3 Perda), hambatan pada *free internal trade* (2 Perda), dan validitas mekanisme yang dipilih dalam mencapai tujuan yang diklaim (2 Perda).

Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip tersebut adalah:

1. Perda Kabupaten Cirebon No.53 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
2. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No.11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Perikanan, dan Lingkungan Perairan;
3. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No.12 Tahun 2001 tentang Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan;
4. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No.13 Tahun 2001 tentang Pungutan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
5. Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No.14 Tahun 2001 tentang Materai Daerah.

Tabel 3.18. Tendensi kebermasalahan Perda Non-Pajak Non Retribusi

No.	Kualifikasi Kebermasalahan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak Bermasalah	12	21
2.	Bermasalah Teknis Perlu Revisi	2	4
3.	Bermasalah Substansi Perlu Revisi	37	66
4.	Bermasalah Prinsip Perlu Dibatalkan	5	9
	Total	56	100

Tabel 3.19. Jenis Pelanggaran Perda-Perda Non-Pajak Non-Retribusi

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah (n=56)	Persentase
1.	<i>Free internal trade</i>	3	5
2.	<i>Double taxation</i>	3	5
3.	Validity	2	4
4.	Birokrasi Perizinan	16	29
5.	Kejelasan Obyek	2	4
6.	Kewajaran Tarif	3	5
7.	Diskoneksi isi-tujuan	1	2
8.	Kelengkapan Yuridis	3	5
9.	Masa Laku Izin	2	4
10.	Kejelasan Isi	20	36
11.	Kejelasan Subyek	1	2
12.	Akses Masyarakat Kecil	1	2
13.	Kemitraan Wajib	1	2
14.	<i>Double taxation</i> sebagian obyek	2	4
15.	Fokus	11	20
16.	Acuan yuridis	12	21
17.	Tidak ada masalah	12	21

Perda-Perda yang bermasalah substansi memperlihatkan persoalan yang terbesar dari kejelasan isi (20 Perda), prosedur birokrasi (16), kejelasan fokus (11), kewajaran tarif (3), kelengkapan yuridis (3), kejelasan obyek (2), masa laku izin (2), potensi monopoli (2), diskoneksi isi-tujuan (1), kejelasan subyek (1), akses masyarakat kecil (1), dan kemitraan wajib (1).

Secara umum, Perda-Perda non-pajak non-retribusi memperlihatkan lebih kecenderungan bermasalah daripada tidak bermasalah. Ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa 75 % Perda berada pada kualifikasi bermasalah secara prinsip (9 %) dan bermasalah substansi (plus 66 %), sementara yang cenderung tidak bermasalah (yang diwakili oleh kualifikasi bermasalah teknis dan tidak bermasalah) berjumlah hanya 25 %.

IV. RINGKASAN HASIL ANALISIS, KESIMPULAN, DAN REKOMENDASI

4.1. Ringkasan Hasil Analisis

Umum

1. Secara keseluruhan, Perda-Perda memperlihatkan kecenderungan bermasalah lebih tinggi daripada tidak bermasalah. Ada 69 % Perda bermasalah, sedangkan 31 % tidak bermasalah.
2. Perda-Perda yang dianalisis memperlihatkan kecenderungan bermasalah secara prinsip, substansi, dan teknis. Kebermasalahan secara substansi memperlihatkan porsi tersebar dibandingkan dengan kebermasalahan secara prinsip dan teknis. Ada 42 % Perda bermasalah secara substansi, sedangkan masing-masing 17 % dan 10 % bermasalah secara teknis dan prinsip.

3. Dominasi permasalahan substansi diperlihatkan secara konsisten, baik pada Perda-Perda pajak daerah, Perda-Perda retribusi daerah, dan Perda-Perda non-pajak non-retribusi. Pada Perda-Perda pajak daerah, permasalahan substansi diperlihatkan oleh 37 % Perda, pada Perda-Perda retribusi daerah 38 %, dan pada Perda-Perda non-pajak non-retribusi 66 %.
 4. Perda-Perda pajak daerah memperlihatkan kecenderungan tidak bermasalah lebih tinggi dibandingkan dengan Perda-Perda retribusi daerah dan Perda-Perda non-pajak non-retribusi. Porsi tidak bermasalah dari Perda-Perda pajak daerah adalah 37 %, sedangkan Perda-Perda retribusi daerah 31 %, dan Perda-Perda non-pajak non-retribusi 21 %.
 5. Perda-Perda retribusi daerah memperlihatkan kecenderungan bermasalah secara prinsip paling tinggi dibandingkan dengan Perda-Perda pajak daerah dan Perda-Perda non-pajak non retribusi. Porsi bermasalah secara prinsip dari Perda-Perda retribusi daerah adalah 11 %, dibandingkan dengan porsi yang sama pada Perda-Perda non-pajak non retribusi 9 % dan Perda-Perda pajak daerah 8 %.
 6. Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip adalah Perda-Perda yang memperlihatkan permasalahan dalam hal hambatan terhadap lalu lintas perdagangan dalam negeri, efek pungutan ganda yang ditimbulkan, dan validitas Perda sebagai mekanisme dalam mencapai tujuan yang diklaim. Dari 35 Perda yang bermasalah secara prinsip, ada 46 % yang memperlihatkan permasalahan hambatan perdagangan dalam negeri, 37 % efek pungutan ganda, dan 31 % validitas sebagai mekanisme kontrol dan regulasi.
 7. Perda-Perda yang bermasalah substansi memperlihatkan jenis permasalahan yang bervariasi. Persoalan kewajaran tarif dan atau struktur tarif, kejelasan birokrasi, kejelasan pengaturan hak dan kewajiban wajib pungutan, dan kejelasan obyek merupakan jenis-jenis permasalahan substansi yang penting, masing-masing 23 %, 21 %, 21 %, dan 17 % dari 195 Perda yang bermasalah substansi.
 8. Namun demikian, jenis permasalahan substansi yang menonjol bervariasi antar-kelompok Perda. Sementara persoalan kewajaran tarif merupakan persoalan yang paling menonjol pada Perda pajak daerah dan Perda retribusi daerah, persoalan kejelasan hak dan kewajiban wajib pungutan merupakan persoalan yang paling menonjol pada Perda-Perda non-pajak non-retribusi. Juga, sementara persoalan kejelasan birokrasi tidak terlihat pada Perda-Perda pajak daerah, persoalan ini justru menonjol pada Perda retribusi daerah.
 9. Perda-Perda yang tidak disarankan dalam PP 65/2001 tentang Pajak Daerah dan PP 66/2001 tentang Retribusi Daerah (*non-listed*) memperlihatkan kecenderungan bermasalah lebih tinggi dibandingkan dengan Perda-Perda yang disarankan kedua peraturan pemerintah tersebut (*listed*). Jika pada Perda-Perda *listed*, ada 39 % yang tidak bermasalah, porsi itu pada Perda-Perda *non-listed* hanya 17 %. Juga, jika pada Perda-Perda *listed* ada seluruhnya 36 % yang bermasalah prinsip dan substansi, porsi itu sebesar 78 % pada Perda-Perda yang *non-listed*.
- ### Perda-Perda Pajak Daerah
10. Walaupun Perda-Perda pajak daerah memperlihatkan kecenderungan tidak bermasalah paling tinggi dibandingkan Perda-Perda retribusi daerah dan Perda-Perda non-pajak non-retribusi, secara keseluruhan Perda-Perda pajak daerah memperlihatkan kecenderungan bermasalah lebih daripada tidak bermasalah. Ada 63 % Perda pajak daerah yang bermasalah, sedangkan yang tidak bermasalah hanya 37 %.
 11. Namun demikian, jika kita menggunakan perbandingan antara kualifikasi kebermasalahkan 3 dan 4 dan kualifikasi kebermasalahkan 1 dan 2 sebagai tolok ukur, maka kecenderungan tidak bermasalah akan lebih besar. 55 % termasuk dalam kualifikasi kebermasalahkan 1 dan 2, sedang hanya 45 % yang masuk kualifikasi kebermasalahkan 3 dan 4.
 12. Sebagaimana telah disebutkan, porsi kualifikasi kebermasalahkan terbesar dari seluruh Perda pajak daerah adalah masalah substansi, yakni 37 % dari keseluruhan Perda. Permasalahan teknis mengambil porsi 18 % dan permasalahan prinsip 8 %.
 13. Jenis permasalahan substansi yang menonjol adalah kewajaran tarif dan struktur tarif, kejelasan obyek, dan kejelasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Jenis permasalahan tarif ditemukan pada 22 % Perda pajak daerah, kejelasan obyek 10 %, dan kejelasan hak dan kewajiban wajib pajak 6 %.
 14. Empat Perda pajak daerah yang bermasalah secara prinsip memperlihatkan persoalan dalam efek pungutan berganda yang ditimbulkan dan hambatan perdagangan. Masalah pungutan berganda ditemukan pada 3 Perda (6 % dari seluruh Perda pajak daerah), sedangkan pelanggaran prinsip *free internal trade* ditemukan pada 1 Perda (2 %).

Perda-Perda Retribusi Daerah

15. Secara keseluruhan, Perda-Perda retribusi daerah cenderung bermasalah. Dari 233 Perda retribusi daerah yang dianalisis, ada 31 % yang tidak bermasalah, sedangkan 69 lainnya bermasalah. Akan tetapi, jika kita menggunakan perbandingan antara kualifikasi kebermasalahan 3 dan 4 dan kualifikasi kebermasalahan 1 dan 2 sebagai ukuran, maka Perda-Perda retribusi daerah akan tampak lebih tidak bermasalah daripada bermasalah. Ada 51 % Perda termasuk memperlihatkan kualifikasi 1 dan 2, sedangkan sisanya 49 % memperlihatkan kualifikasi 3 dan 4.
 16. Perda-Perda retribusi daerah yang tidak bermasalah lebih banyak ditemukan pada golongan retribusi jasa umum dan jasa usaha. Kualifikasi Perda tidak bermasalah merupakan 50 % dari keseluruhan Perda retribusi jasa umum, 42 % dari Perda retribusi jasa usaha, 17 % dari retribusi perizinan tertentu, dan tidak ditemukan pada kelompok Perda retribusi di luar ketiga golongan yang disebutkan dalam PP 66/2001.
 17. Yang paling banyak berkontribusi permasalahan pada Perda retribusi adalah Perda-Perda retribusi perizinan tertentu dan Perda-Perda retribusi di luar ketiga golongan yang disebutkan dalam PP 66/2001. Dengan menggabungkan kualifikasi 3 dan 4, maka ada 100 % Perda retribusi non 3 golongan dan 70 % Perda retribusi perizinan tertentu bermasalah secara prinsip dan substansi, dibandingkan dengan 29 % Perda retribusi jasa umum dan 27 % Perda retribusi jasa usaha yang memperlihatkan kedua kualifikasi tersebut.
 18. Perda-Perda retribusi yang bermasalah prinsip adalah Perda-Perda yang memperlihatkan pelanggaran atas prinsip *free internal trade*, efek pungutan ganda, dan validitas Perda sebagai mekanisme pencapaian tujuan yang diklaim hendak dicapai. Dari 26 Perda retribusi yang bermasalah secara prinsip, ada 46 % yang melanggar prinsip *free internal trade*, 27 % memperlihatkan efek pungutan ganda, dan 35 % permasalahan validitas.
 19. Persoalan substansi yang secara umum menonjol pada Perda-Perda retribusi adalah persoalan kewajaran tarif dan atau struktur tarif, kejelasan obyek, kejelasan birokrasi, kejelasan pengaturan hak dan kewajiban wajib retribusi, kelengkapan yuridis, dan diskoneksi isi Perda dengan tujuan. Secara berturut-turut, persoalan tarif diperlihatkan oleh 35 % dari 88 Perda retribusi yang bermasalah substansi, persoalan kejelasan obyek 31 %, persoalan birokrasi 27 %, persoalan hak dan kewajiban wajib retribusi 20 %, kelengkapan yuridis 10 %, dan diskoneksi isi-tujuan 10 %.
 20. Setiap golongan retribusi memperlihatkan cakupan jenis permasalahan substansi dan jenis permasalahan substansi dominan yang berbeda. Golongan Perda retribusi jasa umum memperlihatkan 3 jenis permasalahan substansi yakni kejelasan obyek, kelengkapan yuridis, dan kewajaran tarif. Golongan Perda retribusi jasa usaha memperlihatkan 5 jenis permasalahan, dengan permasalahan yang dominan adalah kejelasan obyek, kewajaran tarif, dan kejelasan subyek. Perda retribusi perizinan tertentu memperlihatkan 11 jenis persoalan, dengan permasalahan yang dominan adalah kewajaran tarif dan atau struktur tarif, kejelasan birokrasi perizinan, dan kejelasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban wajib retribusi. Perda-Perda retribusi yang tidak termasuk dalam ketiga golongan di atas memperlihatkan 8 jenis permasalahan, dengan jenis permasalahan yang dominan adalah prosedur perizinan, kewajaran tarif, kejelasan obyek, serta kejelasan hak dan kewajiban wajib retribusi.
 21. Perda-Perda retribusi yang disarankan oleh PP 66/2001 memperlihatkan kecenderungan lebih tidak bermasalah dibandingkan dengan Perda-Perda yang tidak disarankan. Dari 162 Perda retribusi yang disarankan, ada 40 % yang tidak bermasalah; sedangkan dari 71 Perda retribusi yang tidak disarankan, ada 10 % yang tidak bermasalah. Porsi Perda yang bermasalah secara prinsip dan substansi dari Perda-Perda yang tidak disarankan adalah 84 %, sedangkan porsi kebermasalahan prinsip dan substansi dari Perda-Perda yang disarankan adalah 33 %.
- ### Perda Non-Pajak Non-Retribusi
22. Perda-Perda non-pajak non retribusi lebih memperlihatkan kecenderungan bermasalah daripada tidak bermasalah. Dari 56 Perda non-pajak non-retribusi, 79 % bermasalah baik secara prinsip, substansi, maupun teknis; sedangkan sisanya 21 % yang tidak bermasalah. Bahkan jika kita menggunakan perbandingan antara kualifikasi 3 dan 4 dan kualifikasi 1 dan 2, Perda-Perda non-pajak non-retribusi masih dapat dikatakan cenderung bermasalah. Perda-Perda non-pajak non-retribusi yang bermasalah secara prinsip dan substansi mengambil porsi 75 %, sedangkan yang bermasalah teknis dan tidak bermasalah hanya 25 %.
 23. Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip memperlihatkan persoalan dalam

hal pelanggaran prinsip *free internal trade*, efek pungutan ganda, dan validitas Perda sebagai mekanisme pencapaian tujuan yang diklaim. Pelanggaran prinsip *free internal trade* diperlihatkan oleh 3 Perda dari 5 Perda yang bermasalah secara prinsip, efek pungutan berdanda 2 Perda, dan persoalan validitas 2 Perda.

24. Perda-Perda yang bermasalah substansi memperlihatkan beberapa persoalan yang menonjol, misalnya kejelasan isi, prosedur birokrasi, dan kejelasan fokus. Persoalan kejelasan isi diperlihatkan oleh 20 Perda dari 37 Perda yang bermasalah secara substansi, prosedur birokrasi 16 Perda, dan kejelasan fokus 11 Perda.

4.2. KESIMPULAN

Perda-Perda yang dianalisis lebih memperlihatkan kecenderungan bermasalah daripada tidak bermasalah. Kecenderungan ini diperlihatkan secara konsisten, baik oleh Perda-Perda pajak daerah, Perda-Perda retribusi daerah, dan Perda-Perda non-pajak non-retribusi. Analisis yang lebih detail atas struktur internal Perda-Perda retribusi yang masih bisa dibedakan antara Perda retribusi jasa umum, Perda retribusi jasa usaha, Perda retribusi perizinan tertentu, serta Perda retribusi di luar 3 golongan pun memperlihatkan kecenderungan yang sama.

Kecenderungan bermasalah tersebut juga tampak masih kuat bahkan jika kita melunakkan tolok ukur sehingga permasalahan teknis relevansi referensi yuridis yang digunakan diabaikan. Permasalahan prinsip dan permasalahan substansi juga masih signifikan diperlihatkan oleh Perda-Perda yang dianalisis, baik itu pada Perda-Perda pajak daerah, Perda-Perda retribusi daerah, maupun Perda-Perda non-pajak non-retribusi.

Sebagaimana yang digunakan sebagai kerangka analisis, kebermasalahan Perda-Perda dapat dibedakan antara kebermasalahan yang sifatnya prinsip, substansi, dan teknis. Perda-Perda yang bermasalah secara prinsip adalah Perda-Perda yang memperlihatkan permasalahan dalam hal hambatan yang ditimbulkan atas lalu lintas perdagangan dalam negeri, efek pungutan ganda, dan validitas Perda sebagai mekanisme dalam mencapai tujuan yang menjustifikasi pembuatan Perda. Walaupun secara proporsional tidak cukup besar dibandingkan dengan kualifikasi kebermasalahan lain, kualifikasi kebermasalahan prinsip patut mendapat perhatian serius. Fokus yang harus ditunjukkan dalam kaitan dengan permasalahan prinsip ini memang ada pada Perda-Perda retribusi yang memperlihatkan jumlah nominal dan persentase yang tinggi, akan tetapi tentunya dengan tidak perlu

mengabaikan Perda-Perda pajak daerah dan Perda-Perda non-pajak non-retribusi.

Kebermasalahan substansi merupakan kualifikasi kebermasalahan yang paling meluas ditemukan di berbagai kelompok dan level Perda yang dianalisis. Berbagai persoalan substansi yang menonjol adalah persoalan kewajaran tarif dan atau struktur tarif, kejelasan birokrasi, kejelasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban wajib pungutan, dan kejelasan obyek. Diabaikannya persoalan-persoalan tersebut berarti masih diabaikannya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan prediktabilitas yang harus diperhatikan dalam pembuatan peraturan daerah apabila pemerintahan daerah yang membuatnya menghendaki tampilnya pemerintahan yang baik.

Meluasnya persoalan relevansi acuan yuridis yang digunakan mengundang pertanyaan mengenai sosialisasi peraturan-peraturan pemerintah di atasnya dalam membimbing peraturan-peraturan daerah. Akan tetapi dapat dicatat bahwa persoalan referensi yuridis yang digunakan tidak dengan sendirinya mengimplikasikan munculnya persoalan-persoalan yang substansial. Hal ini juga dapat dikonfirmasi sebaliknya oleh kenyataan bahwa Perda-Perda yang memperlihatkan persoalan substansi tidak selalu memperlihatkan persoalan referensi yuridis. Dengan demikian, di satu pihak persoalan sosialisasi acuan yuridis yang mutakhir perlu mendapat perhatian, tetapi di sisi lain pula perlu adanya perhatian yang lebih seimbang pada masalah-masalah yang bersifat substansial. Pentingnya fokus pada persoalan-persoalan substansi ini berlaku merata, baik untuk Perda-Perda non-pajak non-retribusi yang memperlihatkan porsi tertinggi, maupun untuk Perda-Perda pajak daerah dan Perda-Perda retribusi daerah.

Secara umum, kebermasalahan Perda-Perda yang dianalisis juga banyak dikontibusi oleh Perda-Perda yang obyeknya dikreasikan oleh pemerintah daerah. Dengan menggunakan kategori *listed* dan *non-listed* dalam PP 65/2001 tentang Pajak Daerah dan PP 66/2001 tentang Retribusi Daerah, analisis ini memperlihatkan bahwa Perda-Perda yang obyeknya dikreasikan sendiri oleh pemerintah daerah di luar yang disarankan kedua peraturan pemerintah tersebut lebih bermasalah dibandingkan dengan Perda-Perda yang obyeknya direkomendasikan. Dengan demikian, secara obyektif harus dikatakan bahwa kreatifitas Pemerintah Daerah masih bermasalah.

Pernyataan obyektif ini tentu saja bisa mengimplikasikan interpretasi dan penyikapan yang bervariasi yang berada di luar cakupan analisis ini. Akan tetapi secara sederhana dapat dikatakan bahwa langkah-langkah yang diperlukan guna pengembangan kemampuan lokal dalam mengoperasikan otonomi daerah

tampaknya perlu mendapat perhatian serius. Pengembangan kemampuan lokal tersebut perlu ditujukan pada pengembangan kemampuan administrasi pemerintahan yang memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, prediktabilitas, dan transparansi dalam proses-proses kebijakan di tingkat lokal.

4.3. REKOMENDASI

1. Berhubung luasnya permasalahan yang ditemukan, diperlukan kerja monitoring yang lebih profesional yang dapat mengungkapkan persoalan-persoalan secara lebih dini dan vokal berkaitan dengan pembuatan perda-perda. Penanganan persoalan perlu dilakukan secara lebih terfokus dan argumentatif, karena bisa saja revisi/pembatalan yang disarankan tidak selalu mudah diterima di hadapan kenyataan-kenyataan politik yang memberikan sumbangsih
2. Berhubung Perda-Perda retribusi yang banyak berkontribusi persoalan prinsip, sosialisasi mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan Perda retribusi perlu mendapat perhatian. Tampaknya prinsip-prinsip *free internal trade*, penghindaraan pungutan berganda atas obyek yang sama, dan akuntabilitas dalam pemilihan obyek retribusi tidak banyak dipahami atau paling tidak diabaikan.
3. Meluasnya persoalan-persoalan substansi mengimplikasikan perlunya sosialisasi yang lebih serius, baik mengenai kerangka yuridis maupun prinsip akuntabilitas, prediktabilitas, dan transparansi yang harus diperhatikan dalam pembuatan aneka peraturan daerah. ■

Lampiran 2.1.

PERATURAN DAERAH DAN JENIS PELANGGARANNYA: Perda Pajak Daerah

NO.	NAMA DAERAH	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	JENIS PELANGGARAN															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	X	
1.	Listed di PP 65/2001																		
1.1.	Bermasalah Prinsip Perlu Dibatalkan																		
	Kota Cirebon	Perda 7/1998	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Baahan Galian Golongan C		V														
	Kota Padang	Perda 27/1997	Pajak Bahan Galian Golongan C		V														
	Subtotal 1.1.				2														
1.2.	Bermasalah Substansi, Perlu Revisi																		
	Kabupaten Aceh Singkil	Perda 20/2000	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan						v								V		
	Kabupaten Aceh Timur	Perda 4/1998	Pajak Penerangan Jalan					v	V										
	Kabupaten Aceh Timur	Perda 6/1998	Pajak Reklame										V						
	Kabupaten Aceh Timur	Perda 7/1998	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C					V											
	Kabupaten Aceh Timur	Perda 8/1998	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan						V										
	Kabupaten Banyuwangi	Perda 10/1998	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C					V											
	Kabupaten Bengkulu	Perda 41/2001	Pajak Penerangan Jalan						V										
	Kabupaten Flores Timur	Perda 4/2000	Pajak Penerangan Jalan						V								V		
	Kabupaten Gianyar	Perda 3/2000	Pajak Reklame											V					
	Kota Jayapura	Perda 13/2000	Pajak Hotel dan Restoran					V									V		
	Kabupaten Lampung Timur	Perda 5/2000	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C					V											
	Kabupaten Pamekasan	Perda 3/2000	Pajak Penerangan Jalan						V										
	Kota Sibolga	Perda 8/2000	Pajak Reklame						V				V						
	Kabupaten Tangerang	Perda 6/1999	Pajak Penerangan Jalan						V								V		
	Kotamadya Tangerang	Perda 10/1999	Pajak Penerangan Jalan						V								V		
	Kotamadya Tangerang	Perda 11/2000	Pajak Hiburan									V					V		
	Kota Ternate	Perda 3/2000	Pajak Penerangan Jalan						V								V		
	Kota Ternate	Perda 06/2000	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan						V								V		
	Subtotal 1.2.							5	11	-	1	-	3	-	-	-	8		

No.	NAMA DAERAH	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	JENIS PELANGGARAN															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.3.	Bermasalah Teknis, Perlu Direvisi																		
	Propinsi Nusa Tenggara Barat	Perda 9/1997	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor														V		
	Kotamadya Padang	Perda 5/1998	Pajak Penerangan Jalan														V		
	Kotamadya Padang	Perda 28/1997	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan														V		
	Kabupaten Tangerang	Perda 3/1999	Pajak Reklame														V		
	Kabupaten Tangerang	Perda 4/1999	Pajak Hiburan														V		
	Kotamadya Tangerang	Perda 9/1999	Pajak Hotel dan Restoran														V		
	Kota Ternate	Perda 4/2000	Pajak Hotel dan Restoran														V		
	Kota Ternate	Perda 5/2000	Pajak Reklame														V		
	Kota Ternate	Perda 7/2000	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C														V		
	Subtotal 1.3.																9		
1.4.	Tidak Bermasalah																		
	Kabupaten Aceh Timur	Perda 5/1998	Pajak Hotel dan Restoran															V	
	Kota Balikpapan	Perda 18/2000	Pajak Hiburan															V	
	Kota Bandarlampung	Perda 10/2000	Pajak Penerangan Jalan															V	
	Kabupaten Bengkalis	Perda 40/2001	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C															V	
	Kabupaten Bengkalis	Perda 43/2001	Pajak Restoran															V	
	Kabupaten Bengkalis	Perda 44/2001	Pajak Hiburan															V	
	Kabupaten Bengkalis	Perda 45/2001	Pajak Reklame															V	
	Kabupaten Lampung Barat	Perda 07/1998	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C															V	
	Kabupaten Luwu Utara	Perda 02/2000	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C															V	
	Kabupaten Manggarai	Perda 06/2001	Pajak Hotel															V	
	Kabupaten Pamekasan	Perda 4/2000	Pajak Reklame															V	
	Kotamadya Samarinda	Perda 20/1997	Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C															V	
	Kabupaten Tanah Laut	Perda 2/1998	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C															V	
	Kabupaten Tangerang	Perda 5/1999	Pajak Hotel dan Restoran															V	
	Kotamadya Tangerang	Perda 08/1999	Pajak Reklame															V	
	Subtotal 1.4.																	15	
	Subtotal 1			-	2	-	-	5	11	-	1	-	3	-	-	-	17	15	
2.	Non-Listed dalam PP 65/2001																		
2.1.	Bermasalah Prinsip, Perlu Dibatalkan																		
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Perda 15/2001	Pajak Perusahaan Industri		V														
	Kabupaten Tolitoli	Perda 25/2001	Pajak Komoditi	V															
	Subtotal 2.1.			1	1														
2.2.	Bermasalah Substansi, Perlu Revisi																		
	Kotamadya Tangerang	Perda 2/2001	Pajak Atas Penyelenggaraan Parkir Swasta											V					
	Subtotal 2.2.													1					
2.3.	Tidak Bermasalah																		
	Kabupaten Cirebon	Perda 51/2001	Pajak Hasil Usaha Sarang Burung Walet															V	
	Kabupaten Deli Serdang	Perda 25/2000	Pajak Produksi Hasil Tambak															V	
	Kota Depok	Perda 7/2001	Pajak Daerah															V	
	Kab. Poso	Perda 26/2001	Pajak Alat Tangkap Ikan															V	
	Subtotal 2.3.																	4	
	Subtotal 2			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	
	Total			1	3	-	-	5	11	-	1	-	3	1	-	-	17	19	

Keterangan: A = Merintang free internal trade; B = Double taxation; C = Invalid mechanism; D = Ketidaktepatan birokrasi perizinan; E = Ketidaktepatan obyek pungutan; F = Ketidaktepatan tarif/struktur tarif; G = Diskoneksi Isi dengan Tujuan; H = Kelengkapan yuridis; I = Kepastian masa laku izin; J = Ketidaktepatan sanksi dan kewajiban wajib pungutan; K = Ketidaktepatan subyek; L = Akses masyarakat kecil; M = Kemitraan yang bersifat wajib; N = Relevansi acuan yuridis; O = Tidak bermasalah

**PERATURAN DAERAH DAN JENIS PELANGGARANNYA:
Perda Retribusi Jasa Umum**

No.	NAMA DAERAH	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	JENIS PELANGGARAN															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Listed di PP 66/2001																		
1.1.	Bermasalah Substansi, Perlu Revisi																		
	Kabupaten Aceh Tengah	Perda 08/2001	Retribusi Parkir di Tepi Jalan									V					V		
	Kota Balikpapan	Perda 20/2000	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran					V				V							
	Kabupaten Gunungkidul	Perda 17/2000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					V									V		
	Kabupaten Merangin	Perda 10/2000	Retribusi Pasar									V							
	Kabupaten Pekalongan	Perda 2/2001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan					V	V										
	Kota Pekanbaru	Perda 06/2000	Retribusi Pasar					V	V		V								
	Kota Probolinggo	Perda 5/2000	Retribusi Parkir									V					V		
	Kotamadya Tangerang	Perda 22/2000	Pengujian Kendaraan Bermotor					V									V		
	Subtotal 1.1.							5	2		1		4				4		
1.2.	Bermasalah Teknis, Perlu Direvisi																		
	Kota Banda Aceh	Perda 5/2000	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran														V		
	Kota Banda Aceh	Perda 6/2000	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum														V		
	Kabupaten Flores Timur	Perda 5/2000	Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														V		
	Kabupaten Gunungkidul	Perda 2/2000	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum														V		
	Kota Jayapura	Perda 7/2000	Retribusi Pasar														V		
	Kabupaten Manggarai	Perda 12/2000	Retribusi Sampah														V		
	Kabupaten Manggarai	Perda 13/2000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor														V		
	Kabupaten Sumba Timur	Perda 37/2000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor															V	
	Kabupaten Tangerang	Perda 4/2000	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum															V	
	Subtotal 1.2.																9		
1.3.	Tidak Bermasalah																		
	Kabupaten Aceh Timur	Perda 8/1999	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum															V	
	Kota Balikpapan	Perda 19/2000	Retribusi Pelayanan Kesehatan															V	
	Kota Balikpapan	Perda 23/2000	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan															V	
	Kabupaten Batanghari	Perda 12/2000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor															V	
	Kabupaten Biak Numfor	Perda 1/2001	Retribusi Pasar															V	
	Kabupaten Bogor	Perda 21/2000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor															V	
	Kota Depok	Perda 3/2001	Retribusi Pasar															V	
	Kota Gorontalo	Perda 6/2000	Retribusi Pasar															V	
	Kabupaten Kerinci	Perda 10/2000	Retribusi Pasar															V	
	Kabupaten Kerinci	Perda 11/1999	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta															V	
	Kota Kupang	Perda 12/2000	Retribusi Biaya Pengurusan KTP dan Akta Catatan Sipil															V	
	Kota Kupang	Perda 18/2000	Pengujian Kendaraan Bermotor															V	
	Kabupaten Magelang	Perda 5/1999	Retribusi Pasar															V	
	Kabupaten Merangin	Perda 18/2000	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum															V	
	Kabupaten Pekalongan	Perda 5/2001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat															V	
	Kota Sibolga	Perda 10/2000	Retribusi Pasar															V	
	Kota Surabaya	Perda 9/2000	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum															V	
	Kabupaten Tabanan	Perda 3/2000	Pengujian Kendaraan Bermotor															V	
	Kabupaten Tangerang	Perda 1/2001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat															V	

No.	NAMA DAERAH	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	JENIS PELANGGARAN															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Kabupaten Tangerang	Perda 3/2000	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta															V	
	Kabupaten Timor Tengah Utara	Perda 2/2001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor															V	
	Subtotal 1.3.																	21	
	Subtotal 1							5	2		4						13	21	
2.	Non-Listed dalam PP 66/2001																		
2.1.	Bermasalah Prinsip Perlu Dibatalkan																		
	Kabupaten Bengkulu Selatan	Perda 21/2000	Retribusi Kartu Ternak			V													
	Kabupaten Bengkulu Selatan	Perda 25/2000	Retribusi Membawa Hasil Perkebunan Keluar Daerah	V															
	Kota Bogor	Perda 7/2001	Retribusi Pemakaian Jalan untuk Angkutan Barang		V														
	Kabupaten Tasikmalaya	Perda 32/2000	Retribusi Pemberian Izin dan Biaya Pembongkaran Reklame		V														
	Subtotal 2.1.			1	2	1													
	Subtotal 2			1	2	1													
	Total			1	2	1	-	5	2	-	4	-	-	-	-	-	13	21	

Keterangan: A = Merintang free internal trade; B = Double taxation; C = Invalid mechanism; D = Ketidaktepatan birokrasi perizinan; E = Ketidaktepatan obyek pungutan; F = Ketidawajaran tarif/struktur tarif; G = Diskoneksi Isi dengan Tujuan; H = Kelengkapan yuridis; I = Kepastian masa laku izin; J = Ketidakpastian sanksi dan kewajiban wajib pungutan; K = Ketidaktepatan subyek; L = Akses masyarakat kecil; M = Kemitraan yang bersifat wajib; N = Relevansi acuan yuridis; O = Tidak bermasalah.

Lampiran 2.3.

PERATURAN DAERAH DAN JENIS PELANGGARANNYA:
Perda Retribusi Jasa Usaha

No.	NAMA DAERAH	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	JENIS PELANGGARAN															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Listed di PP 66/2001																		
1.1.	Bermasalah Prinsip Perlu Dibatalkan																		
	Kabupaten Bekasi	Perda 25/2000	Retribusi Tempat Khusus Parkir			V													
	Kabupaten Cirebon	Perda 54/2001	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan			V													
	Kabupaten Merangin	Perda 16/2000	Retribusi Tempat Khusus Parkir			V													
	Subtotal 1.1.					3													
1.2.	Bermasalah Substansi, Perlu Revisi																		
	Kabupaten Aceh Tengah	Perda 3/2000	Retribusi Pasar					V									V		
	Kabupaten Banggai	Perda 2/2000	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan					V											
	Kabupaten Bangkalan	Perda 12/2000	Retribusi Rumah Potong Hewan					V											
	Kabupaten Barito Utara	Perda 5/2000	Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang									V	V						
	Kabupaten Barito Utara	Perda 6/2000	Retribusi Tempat Tambat Kapal					V					V						
	Kabupaten Biak Numfor	Perda 7/2001	Retribusi Parkir						V				V				V		
	Kabupaten Gunungkidul	Perda 4/2000	Retribusi Pasar										V				V		
	Kota Jayapura	Perda 8/2000	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan						V								V		
	Kota Jayapura	Perda 9/2000	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah					V									V		
	Kabupaten Kotawaringin Barat	Perda 8/2000	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal										V						

No.	NAMA DAERAH	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	JENIS PELANGGARAN															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Kabupaten Merangin	Perda 13/2000	Retribusi Rumah Potong Hewan					V											
	Kabupaten Mojokerto	Perda 4/2000	Retribusi Pasar																
	Propinsi Nusa Tenggara Timur	Perda 3/2000	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah					V									V		
	Kabupaten Pamekasan	Perda 5/2000	Retribusi Pasar					V											
	Kabupaten Pekalongan	Perda 3/2001	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal						V										
	Kabupaten Pekalongan	Perda 4/2001	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan										V						
	Kota Sibolga	Perda 13/2000	Retribusi Terminal						V										
	Kota Sibolga	Perda 12/2000	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan						V										
	Kota Ternate	Perda 12/2000	Retribusi Parkir					V									V		
	Subtotal 1.2.							9	5				3	4			7		
1.3.	Bermasalah Teknis, Perlu Direvisi																		
	Kabupaten Aceh Tengah	Perda 4/2001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah														V		
	Kabupaten Aceh Tengah	Perda 5/2000	Retribusi Rumah Potong Hewan														V		
	Kabupaten Biak Numfor	Perda 6/2001	Retribusi Terminal														V		
	Kabupaten Buol Tolitoli	Perda 11/1999	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan														V		
	Kabupaten Fakfak	Perda 3/2000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah														V		
	Kabupaten Gorontalo	Perda 2/2000	Retribusi Rumah Potong Hewan														V		
	Kabupaten Gunungkidul	Perda 3/2000	Retribusi Tempat Khusus Parkir														V		
	Kabupaten Gunungkidul	Perda 7/2000	Rumah Potong Hewan														V		
	Kabupaten Gunungkidul	Perda 8/2000	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila														V		
	Kabupaten Gunungkidul	Perda 10/2000	Retribusi Terminal														V		
	Kota Jayapura	Perda 5/2000	Retribusi Rumah Potong Hewan														V		
	Kota Jayapura	Perda 6/2000	Retribusi Tempat Khusus Parkir														V		
	Kota Jayapura	Perda 11/2000	Retribusi Terminal														V		
	Kabupaten Mojokerto	Perda 7/2000	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan														V		
	Propinsi Nusa Tenggara Barat	Perda 11/1997	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah														V		
	Propinsi Nusa Tenggara Barat	Perda 12/1997	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah														V		
	Propinsi Nusa Tenggara Timur	Perda 4/2000	Retribusi Tempat Khusus Parkir														V		
	Kabupaten Pamekasan	Perda 5/2000	Retribusi Pasar														V		
	Kota Probolinggo	Perda 4/2000	Retribusi terminal														V		
	Kota Probolinggo	Perda 11/2000	Retribusi Rumah Potong Hewan														V		
	Kabupaten Tangerang	Perda 2/2000	Retribusi terminal														V		
	Kotamadya Tangerang	Perda 07/2000	Retribusi Terminal														V		
	Kotamadya Tangerang	Perda 9/1994	Retribusi Pasar, Tempat Perdagangan Umum dan Jasa														V		
	Kotamadya Tangerang	Perda 19/1996	Retribusi Pasar, Tempat Perdagangan Umum dan Jasa														V		
	Kotamadya Tangerang	Perda 21/2000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah														V		
	Kota Ternate	Perda 09/2000	Retribusi Pasar														V		
	Kota Ternate	Perda 10/2000	Retribusi Terminal														V		
	Subtotal 1.3.																27		
1.4.	Tidak Bermasalah																		
	Kabupaten Aceh Timur	Perda 5/1999	Retribusi Rumah Potong Hewan															V	
	Kabupaten Aceh Timur	Perda 6/1999	Retribusi Terminal															V	
	Kabupaten Aceh Timur	Perda 7/1999	Retribusi Tempat Khusus Parkir															V	
	Kota Balikpapan	Perda 21/2000	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan															V	
	Kota Bandar Lampung	Perda 6/2000	Retribusi Terminal															V	

No.	NAMA DAERAH	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	JENIS PELANGGARAN															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Kabupaten Banggai	Perda 10/2000	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal															V	
	Kabupaten Bengkulu Selatan	Perda 26/2000	Retribusi Produksi Usaha Daerah															V	
	Kabupaten Biak Numfor	Perda 2/2001	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah															V	
	Kabupaten Biak Numfor	Perda 4/2001	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan															V	
	Kabupaten Biak Numfor	Perda 12/2001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah															V	
	Kota Gorontalo	Perda 1/2000	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan															V	
	Kota Gorontalo	Perda 2/2000	Retribusi Rumah Potong Hewan															V	
	Kota Gorontalo	Perda 6/2001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah															V	
	Kota Gorontalo	Perda 8/2000	Retribusi Tempat Khusus Parkir															V	
	Kabupaten Gorontalo	Perda 6/2000	Retribusi Terminal															V	
	Kabupaten Gorontalo	Perda 26/2000	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah															V	
	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Perda 33/2001	Retribusi Pemakaian Toko Milik Pemerintah															V	
	Kabupaten Kerinci	Perda 3/1999	Retribusi Rumah Potong Hewan															V	
	Kabupaten Kerinci	Perda 4/2000	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila															V	
	Kabupaten Kerinci	Perda 14/1999	Retribusi Pengolahan Limbah Cair															V	
	Kabupaten Lombok Barat	Perda 17/2001	Retribusi Pasar Ternak															V	
	Kabupaten Luwu	Perda 4/2000	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan															V	
	Kabupaten Luwu Utara	Perda 25/2000	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah															V	
	Kabupaten Magelang	Perda 12/2001	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan, dan Peredaran Daging															V	
	Kabupaten Merangin	Perda 8/2000	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan															V	
	Kabupaten Merangin	Perda 19/2000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah															V	
	Kabupaten Musi Banyuasin	Perda 6/1999	Retribusi Rumah Potong Hewan															V	
	Kabupaten Ngada	Perda 7/2000	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga															V	
	Propinsi Nusa Tenggara Barat	Perda 8/2000	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila dan Asrama															V	
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Perda 18/2001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah															V	
	Kabupaten Pasir	Perda 16/1999	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal															V	
	Kabupaten Tabanan	Perda 4/2000	Retribusi dan Pengelolaan Terminal															V	
	Kabupaten Timor Tengah Utara	Perda 1/2001	Retribusi terminal															V	
	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Perda 7/2000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah															V	
	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Perda 8/2000	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah															V	
	Kabupaten Tulang Bawang	Perda 03/2000	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila															V	
	Subtotal 1.4.																27	36	
	Subtotal 1			-	-	3	-	9	5	-	-	-	3	4	-	-	34	36	
2.	Non-Listed dalam PP 66/2001																		
2.1.	Bermasalah Prinsip, Perlu Dibatalkan																		
	Kabupaten Aceh Timur	Perda 17/2001	Retribusi Hasil Usaha Perkebunan		V														
	Subtotal 2				1														
	Total			-	1	3	-	9	5	-	-	-	3	4	-	-	34	36	

Keterangan: A = Merintang free internal trade; B = Double taxation; C = Invalid mechanism; D = Ketidakjelasan birokrasi perizinan; E = Ketidakjelasan obyek pungutan; F = Ketidawajaran tariff/struktur tariff; G = Diskoneksi Isi dengan Tujuan; H = Kelengkapan yuridis; I = Kepastian masa laku izin; J = Ketidakpastian sanksi dan kewajiban wajib pungutan; K = Ketidakjelasan subyek; L = Akses masyarakat kecil; M = Kemitraan yang bersifat wajib; N = Relevansi acuan yuridis; O = Tidak bermasalah.

PERATURAN DAERAH DAN JENIS PELANGGARANNYA:
Perda Retribusi Perizinan Tertentu

NO.	NAMA DAERAH	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	JENIS PELANGGARAN															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Listed di PP 66/2001																		
1.1.	Kategori Bermasalah Substansi, Perlu Revisi																		
	Kabupaten Aceh Tengah	Perda 5/2001	Retribusi Izin Gangguan							V			V		V				
	Kabupaten Aceh Tengah	Perda 9/2001	Retribusi Izin Trayek									V					V		
	Kabupaten Banggai	Perda 8/2000	Retribusi Izin Gangguan						V			V							
	Kabupaten Biak Numfor	Perda 9/2001	Retribusi Izin Gangguan						V										
	Kabupaten Buol Tolitoli	Perda 10/1999	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol										V				V		
	Kotamadya Cirebon	Perda 26/1996	Izin Mendirikan Bangunan				V										V		
	Kabupaten Fakfak	Perda 4/2000	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol						V			V					V		
	Kabupaten Flores Timur	Perda 6/2000	Retribusi Izin Gangguan						V			V							
	Kabupaten Gorontalo	Perda 4/2000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan									V							
	Kabupaten Gorontalo	Perda 7/2000	Retribusi Izin Trayek						V										
	Kabupaten Gunung Kidul	Perda 9/2000	Retribusi Izin Trayek				V					V					V		
	Kota Jayapura	Perda 10/2000	Retribusi Izin Trayek									V					V		
	Kabupaten Kerinci	Perda 6/2000	Retribusi Izin Gangguan						V										
	Kabupaten Ketapang	Perda 7/2000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				V												
	Kabupaten Luwu	Perda 5/2000	Retribusi Izin Gangguan						V			V							
	Kabupaten Luwu Utara	Perda 12/2000	Retribusi Izin Gangguan										V						
	Kabupaten Merangin	Perda 9/2000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan						V										
	Kabupaten Merangin	Perda 17/2000	Retribusi Izin Gangguan				V		V										
	Kabupaten Musi Banyuasin	Perda 9/1999	Retribusi Izin Gangguan						V										
	Kota Padang	Perda 4/2000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan								V		V						
	Kabupaten Pamekasan	Perda 7/2000	Retribusi Izin Trayek				V										V		
	Kotamadya Parepare	Perda 4/1999	Retribusi Izin Gangguan						V	V									
	Kota Sibolga	Perda 17/2000	Retribusi Izin Gangguan						V										
	Kota Ternate	Perda 8/2000	Retribusi Izin Gangguan						V								V		
	Subtotal 1.1.						5	-	13	2	1	3	9	-	1		8		
1.2.	Bermasalah Teknis, Perlu Direvisi																		
	Kabupaten Aceh Tengah	Perda 14/2001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan														V		
	Kabupaten Banyuwangi	Perda 22/1998	Retribusi Izin Gangguan														V		
	Kabupaten Biak Numfor	Perda 8/2001	Retribusi Izin Trayek														V		
	Kabupaten Gunung Kidul	Perda 11/2000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan														V		
	Kota Jayapura	Perda 16/2000	Izin Mendirikan Bangunan														V		
	Kabupaten Tangerang	Perda 7/1999	Retribusi Izin Trayek														V		
	Kota Ternate	Perda 14/2000	Retribusi Izin mendirikan Bangunan														V		
	Subtotal 1.2.																7		
1.3.	Tidak Bermasalah																		
	Kabupaten Aceh Timur	Perda 4/1999	Retribusi Izin Trayek															V	
	Kabupaten Donggala	Perda 4/2000	Retribusi Izin Gangguan															V	
	Kota Gorontalo	Perda 4/2000	Retribusi Izin Trayek															V	
	Kabupaten Kerinci	Perda 4/1999	Retribusi Izin Trayek															V	
	Kabupaten Luwu	Perda 6/2000	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan															V	
	Kabupaten Merangin	Perda 15/2000	Retribusi Izin Trayek															V	
	Kabupaten Musi Banyuasin	Perda 8/1999	Retribusi Izin Trayek															V	
	Kotamadya Parepare	Perda 9/1999	Izin Mendirikan Bangunan															V	
	Subtotal 1.3.																	8	
	Subtotal 1			-	-	-	5	-	13	2	1	3	9	-	1	-	15	8	
2.	Non-Listed dalam PP 66/2001																		
2.1.	Bermasalah Prinsip, Perlu Dibatalkan																		

NO.	NAMA DAERAH	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	JENIS PELANGGARAN															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Kabupaten Bengkulu Selatan	Perda 10/2001	Retribusi Izin Kepemilikan Gergaji Rantai			V													
	Kabupaten Bengkulu Selatan	Perda 22/2000	Retribusi Izin Pengeluaran Hewan Ternak Keluar Kabupaten	V															
	Kabupaten Deli Serdang	Perda 17/2000	Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan			V													
	Kabupaten Gorontalo	Perda 63/2000	Retribusi Izin Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai			V													
	Propinsi Lampung	Perda 6/2000	Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi	V															
	Kabupaten Biak Numfor	Perda 13/2001	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah		V														
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Perda 20/2001	Retribusi Izin Lalulintas Hasil Buah-Buahan/Hortikultura dan Buah Kelapa Sawit	V															
	Subtotal 2.1.			3	1	3													
2.2.	Bermasalah Substansi, Perlu Revisi																		
	Kabupaten Aceh Tengah	Perda 03/2001	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah						V			V							
	Kabupaten Bekasi	Perda 13/2001	Pertambangan Umum				V				V					V			
	Kabupaten Bengkulu Selatan	Perda 08/2001	Retribusi Produksi Kayu atas Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Tanah Milik				V												
	Kota Binjai	Perda 05/2000	Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet														V		
	Kota Binjai	Perda 05/2001	Izin Tempat Usaha				V					V							
	Kabupaten Blitar	Perda 26/2000	Retribusi Izin Tebang Kayu Desa/ Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan serta Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik/SAKM				V	V					V						
	Kabupaten Blitar	Perda 27/2000	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Rakyat Non Kayu dalam Kabupaten Blitar				v						V		V				
	Kabupaten Deli Serdang	Perda 22/2000	Retribusi Izin Usaha Perikanan				V		V		V								
	Kabupaten Gorontalo	Perda 9/2000	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah						V	V									
	Kabupaten Gorontalo	Perda 12/2000	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Rakyat				V	V											
	Kabupaten Gorontalo	Perda 62/2000	Retribusi Izin Pengolahan, Penumpukan, dan Penjualan Kayu Bakar					V		V									
	Kabupaten Gorontalo	Perda 65/2000	Retribusi Pengamanan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Perkebunan							V									
	Propinsi Gorontalo	Perda 67/2000	Retribusi Izin Penangkapan dan Budidaya Ikan di Danau Limboto					V											
	Kabupaten Indramayu	Perda 27/2001	Retribusi Izin Usaha Industri				V		V										
	Kabupaten Indramayu	Perda 29/2001	Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan				V	V											
	Kabupaten Indramayu	Perda 33/2001	Retribusi Izin Pembuatan, Pengusahaan Tambak, dan Pengelolaan Tempat Penjualan Hasil Tambak				V	V											
	Kabupaten Indramayu	Perda 34/2001	Retribusi Izin Usaha Pembenihan Udang					V											
	Kabupaten Kapuas Hulu	Perda 11/2000	Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet				V				V								
	Kabupaten Karawang	Perda 18/2001	Retribusi Izin Pertambangan Umum				V	V											
	Propinsi Lampung	Perda 9/2000	Retribusi Izin Penyimpanan/ Penimbunan Semen dan Batubara serta Mineral Lainnya																
	Kabupaten Lombok Barat	Perda 21/2001	Retribusi Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu				V	V						V	V				

NO.	NAMA DAERAH	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	JENIS PELANGGARAN															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Kabupaten Magelang	Perda 14/2001	Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Angkut Kayu Milik (SAKM)						V	V									
	Kabupaten Manggarai	Perda 8/2001	Retribusi Izin Pengusahaan Bahan Bakar Minyak dan Gas				V		V										
	Kabupaten Merangin	Perda 5/2000	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan					V		V									
	Kabupaten Merangin	Perda 12/2000	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah						V			V							
	Kabupaten Muara Enim	Perda 9/1998	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah						V								V		
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Perda 16/2001	Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan, Izin Usaha Industri, dan Izin Tanda Daftar Gudang				V					V							
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Perda 19/2001	Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Rakyat/Tanah Milik					V											
	Kabupaten Toba Samosir	Perda 7/2001	Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung, dan Keramba										V			V			
	Subtotal 2.2.						15	11	8	6	3	4	4	1	2	2	2		
2.3.	Bermasalah Teknis, Perlu Revisi																		
	Kabupaten Banyuwangi	Perda 23/1998	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah															V	
	Kabupaten Deli Serdang	Perda 25/1998	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah															V	
	Kota Padang	Perda 9/1994	Pemakaman															V	
	Kabupaten Tanah Laut	Perda 30/1995	Pemungutan retribusi terhadap Pemberian Izin Pembukaan Tanah															V	
	Subtotal 2.3.																4		
2.4.	Tidak Bermasalah																		
	Kabupaten Batanghari	Perda 13/2000	Izin Penggunaan Jalan															V	
	Kota Depok	Perda 5/2001	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah															V	
	Kabupaten Indramayu	Perda 26/2001	Izin Usaha Perdagangan															V	
	Kabupaten Ketapang	Perda 4/2000	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah															V	
	Kotamadya Parepare	Perda 12/1999	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah															V	
	Kabupaten Poso	Perda 25/2001	Retribusi Izin Usaha Perikanan															V	
	Kabupaten Toba Samosir	Perda 14/2001	Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik															V	
	Subtotal 2.4.																	7	
	Subtotal 2			3	1	3	15	11	8	6	3	4	4	1	2	1	6	7	
	Total			3	1	3	20	11	21	8	4	7	13	1	3	1	21	15	

Keterangan: A = Merintang free internal trade; B = Double taxation; C = Invalid mechanism; D = Ketidaktepatan birokrasi perizinan; E = Ketidaktepatan obyek pungutan; F = Ketidaktepatan tarif/struktur tarif; G = Diskoneksi Isi dengan Tujuan; H = Kelengkapan yuridis; I = Kepastian masa laku izin; J = Ketidaktepatan sanksi dan kewajiban wajib pungutan; K = Ketidaktepatan subyek; L = Akses masyarakat kecil; M = Kemitraan yang bersifat wajib; N = Relevansi acuan yuridis; O = Tidak bermasalah.

PERATURAN DAERAH DAN JENIS PELANGGARANNYA:
Perda Retribusi Non Kategori

No	NAMA DAERAH	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	JENIS PELANGGARAN															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Bermasalah Prinsip Perlu Dibatalkan																		
	Kabupaten Aceh Tengah	Perda 10/2001	Retribusi Hasil Hutan Ikutan			v													
	Kabupaten Bengkulu Selatan	Perda 23/2000	Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak dan Bahan Asal Hewan Ternak Keluar Daerah	V											V				
	Kota Bogor	Perda 4/2001	Retribusi Pemasukan dan Penampungan serta Pengeluaran Hewan/Ternak	V															
	Kabupaten Gorontalo	Perda 64/2000	Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pembinaan Peternakan	v		V													
	Kabupaten Indramayu	Perda 11/2001	Retribusi Dispensasi Bongkar Muat Barang			V													
	Propinsi Lampung	Perda 8/2000	Retribusi Pengangkutan Bahan Galian Batubara, Bahan Baku Semen, dan Barang-Barang Potensial Lainnya	V															
	Kabupaten Pasaman	Perda 2/2001	Retribusi Asal Komoditas	V															
	Kabupaten Sanggau	Perda 9/2000	Retribusi Angkutan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Inti Sawit (PK) dan Minyak Kelapa Sawit	V															
	Kabupaten Serang	Perda 7/2001	Retribusi Kayu	V															
	Propinsi Sulawesi Selatan	Perda 5/1996	Retribusi Pengeluaran dan Pemasukan Ikan di Sulawesi Selatan	V															
	Kabupaten Tolitoli	Perda 26/2001	Retribusi dan Pungutan Bukan Pajak Sumber Daya Perikanan dan Kelautan		v	V													
	Subtotal 1			8	1	4													
2.	Bermasalah Substansi, Perlu Revisi																		
	Kabupaten Bengkulu Selatan	Perda 24/2000	Retribusi Hasil Hutan Ikutan				v	v		V									
	Kota Bitung	Perda 9/2000	Retribusi Perikanan				v		V										
	Kabupaten Blitar	Perda 23/2000	Retribusi Kartu Ternak				v		v										
	Kabupaten Blitar	Perda 24/2000	Retribusi Pemeriksaan Daging yang Berasal dari Luar Daerah dan Dipasarkan di Kabupaten Blitar						v				v						
	Kota Bogor	Perda 5/2001	Retribusi Pemeriksaan Susu Murni											V					
	Kabupaten Deli Serdang	Perda 12/2000	Retribusi Pemeriksaan, Pengawasan, dan Penyediaan Racun Api					v			V								
	Propinsi Nusa Tenggara Barat	Perda 15/2001	Retribusi Pengujian Alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya				v												
	Kota Tangerang	Perda 9/2000	Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tata Niaga Ternak																
	Subtotal 2			-	-	-	4	2	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	
	Total			8	1	4	4	2	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	

Keterangan: A = Merintang free internal trade; B = Double taxation; C = Invalid mechanism; D = Ketidajelasan birokrasi perizinan; E = Ketidajelasan obyek pungutan; F = Ketidawajaran tariff/struktur tariff; G = Diskoneksi Isi dengan Tujuan; H = Kelengkapan yuridis; I = Kepastian masa laku izin; J = Ketidakpastian sanksi dan kewajiban wajib pungutan; K = Ketidajelasan subyek; L = Akses masyarakat kecil; M = Kemitraan yang bersifat wajib; N = Relevansi acuan yuridis; O = Tidak bermasalah.

PERATURAN DAERAH DAN JENIS PELANGGARANNYA:
Perda Non-Pajak Non-Retribusi

NO.	NAMA DAERAH	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	JENIS PELANGGARAN															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Bermasalah Prinsip Perlu Dibatalkan																		
	Kabupaten Cirebon	Perda 53/2001	Penyelenggaraan pelelangan ikan	V														V	
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Perda 11/2001	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Perikanan, dan Lingkungan Perairan			V									V				
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Perda 12/2001	Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP)	V	V														
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Perda 13/2001	Pungutan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan		V														
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Perda 14/2001	Materai Daerah		V	V													
	Subtotal 1			2	3	2									1			1	
2.	Bermasalah Substansi, Perlu Revisi																		
	Kabupaten Aceh Tengah	Perda 7/2001	Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet																
	Kota Balikpapan	Perda 16/2000	Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol										V						
	Kota Balikpapan	Perda 27/2000	Izin Operasional Tempat Pendaratan Kapal										V						
	Kota Balikpapan	Perda 29/2000	Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C										V						
	Kota Balikpapan	Perda 30/2000	Izin Reklame										V						
	Kota Banda Aceh	Perda 9/2000	Pengelolaan Terminal dan Pangkalan										V						
	Kota Banda Aceh	Perda 10/2000	Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang di Jalan				V						V						
	Kabupaten Bangka	Perda 6/2001	Pengelolaan Pertambangan Umum				V									V			
	Kabupaten Bengkalis	Perda 20/2000	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Perairan	V			V												
	Kabupaten Bengkulu Selatan	Perda 5/2000	Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet										V						
	Kabupaten Bengkulu Selatan	Perda 7/2001	Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM)										V						
	Kabupaten Bengkulu Selatan	Perda 9/2001	Izin Pemanfaatan Kayu						V				V						
	Kabupaten Berau	Perda 2/2001	Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet						V										
	Propinsi Jawa Barat	Perda 19/1998	Izin Usaha Pemotongan Hewan Antar Daerah										V						
	Propinsi Jawa Barat	Perda 23/2000	Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar									V							
	Propinsi Jawa Barat	Perda 24/2000	Usaha Pengolahan Teh																
	Kota Jogjakarta	Perda 5/2001	Perizinan Angkutan				V						V						
	Kabupaten Kapuas	Perda 6/2000	Pungutan Daerah dan Penyeteran Iuran Kehutanan dari Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Berupa Kayu									V							
	Kabupaten Kapuas	Perda 11/2000	Izin Industri Kayu																
	Kabupaten Lombok Barat	Perda 14/2001	Usaha Perikanan																
	Kabupaten Magelang	Perda 5/2000	Bangunan				V		V						V				
	Kabupaten Magelang	Perda 13/2001	Kartu Ternak				V												
	Kabupaten Muara Enim	Perda 22/2001	Izin Perubahan Penggunaan Tanah				V					V	V						
	Kabupaten Muara Enim	Perda 23/2001	Surat Izin Tempat Usaha				V	V				V							
	Kabupaten Muara Enim	Perda 32/2001	Penyelenggaraan Usaha Minyak dan Gas Bumi				V												

NO.	NAMA DAERAH	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	JENIS PELANGGARAN															
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Kabupaten Muara Enim	Perda 34/2001	Penyelenggaraan Sekolah Swasta										V						
	Kabupaten Muara Enim	Perda 39/2001	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Tanaman dan Hutan Produksi Alam				V			V									
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Perda 17/2001	Sewa Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas						V				V						
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Perda 25/2001	Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam				V						V						
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Perda 26/2001	Izin Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Rakyat, Kayu Cerucuk, dan Penimbunan Kayu pada Depot/Kios										V						
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Perda 28/2001	Usaha Pertambangan Umum mengenai Pajak Pengambilan dan Pengelolaan																
	Kota Pekanbaru	Perda 7/2000	Izin Tempat Usaha				V		V										
	Kota Pekanbaru	Perda 9/2000	Perizinan Usaha Perikanan				V						V						
	Kabupaten Poso	Perda 23/2001	Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan				V						V	V					
	Kabupaten Serang	Perda 9/2001	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan					V				V			V				
	Kabupaten Sumedang	Perda 53/2000	Pengusahaan Pertambangan Daerah				V						V						
	Kota Surabaya	Perda 10/2000	Ketentuan Penggunaan Jalan				V		V										
	Subtotal 2			1			16	2	3	1	3	2	20	1	1	1	-	-	
3.	Bermasalah Teknis, Perlu Direvisi																		
	Kabupaten Tangerang	Perda 6/2000	Kerja sama Pemda dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau pengelolaan Potensi Daerah														V		
	Kotamadya Tangerang	Perda 17/2000	Kerja sama Pemda dan Badan Usaha Swasta														V		
	Subtotal 3																2		
4.	Tidak Bermasalah																		
	Kota Balikpapan	Perda 26/2000	Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum															V	
	Kota Balikpapan	Perda 28/2000	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan															V	
	Kota Balikpapan	Perda 33/2000	Pengaturan Lalu Lintas Jalan															V	
	Kabupaten Bantul	Perda 57/2000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															V	
	Kabupaten Bengkalis	Perda 27/2001	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar															V	
	Kabupaten Bengkalis	Perda 32/2001	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal															V	
	Kabupaten Cirebon	Perda 55/2001	Pengelolaan Barang Daerah															V	
	Kabupaten Gorontalo	Perda 13/2000	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemda															V	
	Kota Kupang	Perda 5/2000	Angkutan Kota															V	
	Kabupaten Kutai	Perda 36/2000	Usaha Perikanan															V	
	Propinsi Nusa Tenggara Barat	Perda 16/2001	Pungutan Perikanan															V	
	Kabupaten Tangerang	Perda 2/2001	Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan															V	
	Subtotal 4																	12	
	TOTAL			3	3	2	16	2	3	1	3	2	20	1	1	1	2	12	

Keterangan: A = Merintang free internal trade; B = Double taxation; C = Invalid mechanism; D = Ketidakjelasan birokrasi perizinan; E = Ketidakjelasan obyek pungutan; F = Ketidawajaran tarif/struktur tarif; G = Diskoneksi Isi dengan Tujuan; H = Kelengkapan yuridis; I = Kepastian masa laku izin; J = Ketidakpastian sanksi dan kewajiban wajib pungutan; K = Ketidakjelasan subyek; L = Akses masyarakat kecil; M = Kemitraan yang bersifat wajib; N = Relevansi acuan yuridis; O = Tidak bermasalah.

